

INDIKATOR TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN 2017



INDIKATOR TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN 2017



INDIKATOR TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN 2017

ISBN : 978-602-632-960-8
Nomor Publikasi : 18090.1821
Katalog BPS : 2302003.1809
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xxii+ 79 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Pesawaran

Gambar Kulit :

BPS Kabupaten Pesawaran

Diterbitkan oleh :

@ BPS Kabupaten Pesawaran

Dicetak oleh :

CV Jaya Wijaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Wintarti Dyah Indriani, SE

Penyunting:

Abdul Kadir, SEI

Rizqa Fithriani S.ST, M.Si

Penulis:

Tri Rena Mayasari, S.ST

Pengolah data:

Tri Rena Mayasari, S.ST

Lay out:

Henida Widyatama, S.ST

Gambar Kulit:

Rizqa Fithriani, S.ST, M.Si

KATA PENGANTAR

Pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran memerlukan dukungan data yang lengkap dan berkesinambungan untuk kepentingan evaluasi sekaligus bahan perencanaan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Publikasi Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran 2017 ini salah satu yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan di atas. Publikasi ini menyajikan data *Key Indicators of Labour Market* (KILM) Tahun 2017.

Dalam kedudukannya sebagai sebuah media informasi, publikasi ini memuat analisis dan indikator yang menggambarkan keadaan terkini pasar ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran, dimana data yang digunakan sebagian besar adalah data yang dihitung dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2017, Pelaksanaan kegiatan lapangan Sakernas Februari dapat menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu untuk menyajikan angka estimasi hingga tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.

Atas terbitnya publikasi ini, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang secara aktif telah ikut memberikan kontribusinya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Gedong Tataa, Desember 2018

BPS Kabupaten Pesawaran

Kepala



Wintarti Dyah Indriani, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan Eksekutif	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Sakernas Dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas Dan Kilm	3
1.3 Peran Kilm Di Bidang Ketenagakerjaan	5
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan Kilm	7
Bab 2 Partisipasi Dan Indikator Tenaga Kerja	11
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	11
KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk	14
KILM 3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	17
KILM 4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	20
KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	23
KILM 6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	25
KILM 7. Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Informal	28
Bab 3 Indikator Pengangguran	35
KILM 8. Pengangguran	35
KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda	38
KILM 11. Pengangguran Dan Pendidikan	40
KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	44
KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan	48
Bab 4 Indikator Pendidikan Dan Melek Huruf	51
Kilm 14. Pencapaian Pendidikan Dan Melek Huruf	51
Penjelasan Teknis	53
Indikator Pasar Tenaga Kerja	57
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58

KILM 2. Rasio Penduduk Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment To Population Ratio-EPR</i>).....	58
KILM 3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	59
KILM 4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha.....	61
KILM 5. Pekerja Paruh Waktu.....	62
KILM 6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja	62
KILM 7. Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Informal.....	63
KILM 8. Pengangguran.....	64
KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda	66
KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang	66
KILM 11. Pengangguran Dan Pendidikan	66
KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	67
KILM 13. Tingkat Ketidaktifan.....	68
KILM 14. Pencapaian Pendidikan Dan Melek Huruf.....	68
KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur	69
KILM 16. Indikator Upah Dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan	70
KILM 17. Upah Per Jam	70
KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja.....	70
KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja	71
KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja Yang Miskin, Dan Distribusi Pendapatan.	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2017	17
Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	20
Tabel 3. Perbandingan Status Pekerjaan Utama dengan Jam Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2017	26
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	35
Tabel 5. Penduduk umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	45
Tabel 6. Perbandingan persentase setengah penganggur dengan angkatan kerja dan Penduduk Bekerja di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	46
Tabel 7. Indikator Ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	49
Tabel 8. Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.....	11
Grafik 2. Perbandingan TPAK Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	12
Grafik 3. Perbandingan TPAK menurut Kelompok umur di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	13
Grafik 4. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	14
Grafik 5. Perbandingan Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk(EPR) berdasarkan Umur Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	15
Grafik 6. Perbandingan Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk (EPR) berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	16
Grafik 7. Perbandingan Pekerja rentan dan tak Rentan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.....	18
Grafik 8. Perbandingan Pekerja Rentan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017.....	19
Grafik 9. Perbandingan penduduk umur 15 tahun yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Sektor lapangan usaha utama di Provinsi Lampung	22
Grafik 10. Perbandingan Tingkat Pekerja Paruh Waktu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	23
Grafik 11. Perbandingan Tingkat Pekerja Paruh Waktu berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	24
Grafik 12. Perbandingan Jumlah Jam kerja di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	25
Grafik 13. Perbandingan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dengan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	28
Grafik 14. Persentase Pekerja Formal dan Informal Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	29
Grafik 15. Perbandingan Jam kerja pada Sektor Formal dan Informal di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	30
Grafik 16. Perbandingan Pekerja di Sektor Formal dan Informal Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	31
Grafik 17. Perbandingan Pekerja Formal dan Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	33
Grafik 18. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017.....	36

Grafik. 19. Perbandingan TPT Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2017	37
Grafik 20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2017	38
Garfik 21. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung Tahun 2017	39
Grafik 22. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017	41
Garfik 23. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017	42
Grafik 24. Perbandingan Penganggur menurut Jenjang Pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Lampung Tahun 2017	44
Grafik 25. Perbandingan Persentase setengah menganggur Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017	47
Grafik. 26 Perbandingan Tingkat Ketidakaktifan Kaupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2017	74
Lampiran 2	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota(Persen), Agustus 2017.....	75
Lampiran 3	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota(Persen), Agustus 2017	76
Lampiran 4	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Persen), Agustus 2017.....	77
Lampiran 5	Indikator Penduduk Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2017..	78
Lampiran 6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2017.....	79

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2017 mencapai 431.198 penduduk. Hasil Sakernas Agustus 2017 di Kabupaten Pesawaran menyebutkan bahwa jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja mencapai 211.407 penduduk dan penduduk umur 15 tahun keatas yang bukan termasuk angkatan kerja mencapai 101.874 penduduk.

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja terdiri dari angkatan kerja yang bekerja sebanyak 199.288 penduduk, pernah bekerja sebanyak 5.339 penduduk dan tidak pernah bekerja sebanyak 6.780 penduduk. Berdasarkan jenis kelamin, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh laki-laki. Terdapat 141.431 penduduk laki-laki atau sekitar 66,89 persen merupakan angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran. Sedangkan sisanya yaitu 69.976 atau sebesar 33,10 persen merupakan angkatan kerja perempuan.

Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang merupakan bukan angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran terdiri dari 18.311 penduduk yang sedang bersekolah, 73.019 penduduk yang mengurus rumah tangga dan 10.544 penduduk yang melakukan aktifitas lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh perempuan. Terdapat 81.827 penduduk atau sebesar 80,32 persen perempuan yang merupakan bukan angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu 20.047 penduduk atau 19,68 persen laki-laki merupakan bukan angkatan kerja laki-laki.

Penduduk umur 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja paling banyak merupakan tamatan sekolah dasar, yaitu sebanyak 52.746 atau sebesar 24,95 persen. Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2015 memiliki distribusi yang tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Agustus 2013 dan Agustus 2014), persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar (24,22 persen), diikuti dengan penduduk dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (22,33 persen),

dan urutan tiga yaitu status penduduk dengan status buruh/karyawan/pegawai (14,50 persen)

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2015 masih mempunyai pola yang sama dengan tahun 2013 dan 2014 yaitu didominasi oleh sektor pertanian dengan persentase penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 69,37 persen. Selanjutnya adalah sektor jasa-jasa sebesar 22,26 persen, dan sektor manufaktur sebesar 8,37 persen.

Pada Agustus 2015, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 30,90 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat 31 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan terhadap Agustus 2014 sebesar 1,01 persen poin dan penurunan cukup besar terhadap Agustus 2013 sebesar 13,02 persen poin.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar 56,67 persen penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 43,34 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2014. Penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar (58,55 persen) mengalami peningkatan sebesar (1,88 persen) terhadap hasil Sakernas Agustus 2015.

Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa dari 264.712 ribu orang yang bekerja, sebanyak 84,35 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (211.477 ribu orang). Pada periode Agustus 2014 dan Agustus 2013, tampak adanya penurunan dan kenaikan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor informal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2014 sebesar 87,99 persen, naik 3,64 persen dan pada Agustus 2013 sebesar 78,69 persen, turun 5,66 dari keadaan Agustus 2015.

TPT berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 5,72 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Pesawaran, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Pesawaran mengalami fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014. TPT pada Agustus 2015 mengalami peningkatan dari 4,60 persen bila dibandingkan dengan Agustus

2014 (1,12 poin). Fenomena kenaikan TPT ini telah terlihat dari tahun 2013 yaitu sebesar 4,88 persen.

TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 24,80 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 25 orang yang menganggur. Angka tersebut bila dibandingkan dengan Agustus 2014 dan Agustus 2013 masing-masing mengalami kenaikan 7,06 dan 4,1 persen poin.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 12,00 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,56 persen.

Jumlah setengah penganggur di Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sakernas Agustus 2015, mencapai 109.685 ribu orang, yang terdiri dari 48.392 ribu orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 61.293 ribu orang adalah perempuan. Sedangkan menurut klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2015, jumlah setengah penganggur di daerah pedesaan mencapai hampir enam kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di pedesaan mencapai 94.264 ribu orang, sementara di perkotaan sebanyak 15.421 ribu orang.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2015 naik jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 sebesar 2,88 persen poin dan turun Agustus 2013 sebesar 2,26 persen poin. Sejalan dengan penurunan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami penurunan, sebanyak 3,57 persen dari (115.835 ribu orang) pada Agustus 2014 sedangkan pada Agustus 2013 naik sebanyak 1,36 persen dari (134.558 ribu orang) bila dibandingkan hasil Sakernas Agustus 2015 (129.383 ribu orang).

Pada Sakernas Agustus 2015, secara level kabupaten tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang berarti jika dibandingkan dengan Sakernas pada Agustus 2014 dan Agustus 2013. Angkatan kerja pada Agustus 2015 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah menengah yaitu sebesar 39,18 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah dasar sebesar 37,58 persen, sementara untuk tamatan

sekolah tinggi hanya sebesar 3,29 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 19,95 persen.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Pesawaran. BPS Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018 ini, pertama kalinya untuk penyusunan publikasi Indikator Tenaga Kerja 2017, yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia khususnya di Kabupaten Pesawaran.

1.1 SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan. Mulai tahun 2015 sampai sekarang, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) ke-13 tahun 1982.

Pada tahun 2013, *International Labour Organization* (ILO) menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (yang dalam ICLS ke-19 disebut dengan Work) dengan batasan produksi yang mengacu pada *System ational Account* (SNA) 2008.

Mulai tahun 2016, kuesioner Sakernas sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Pada Sakernas 2017 dilakukan penyempurnaan

kembali penerapan konsep ICLS ke-19 mencakup penyempurnaan alur pertanyaan dan penambahan beberapa pertanyaan dalam kuesioner.

Besarnya sampel Sakernas Agustus 2017 sebanyak 20.000 blok sensus, yang terdiri dari 5.000 blok sensus Sakernas Februari 2017 dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan sampel sebesar 15.000 blok sensus dimaksudkan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana dan

ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error-nya*.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan pada Agustus 2017 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam

Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awal dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan,

Untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain. Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga dapat menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan *Milenium* (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam *MDGs* tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan,

tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antar daerah. Akan

tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya dapat menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi. Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang dapat memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga dapat menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya,

tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamakan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

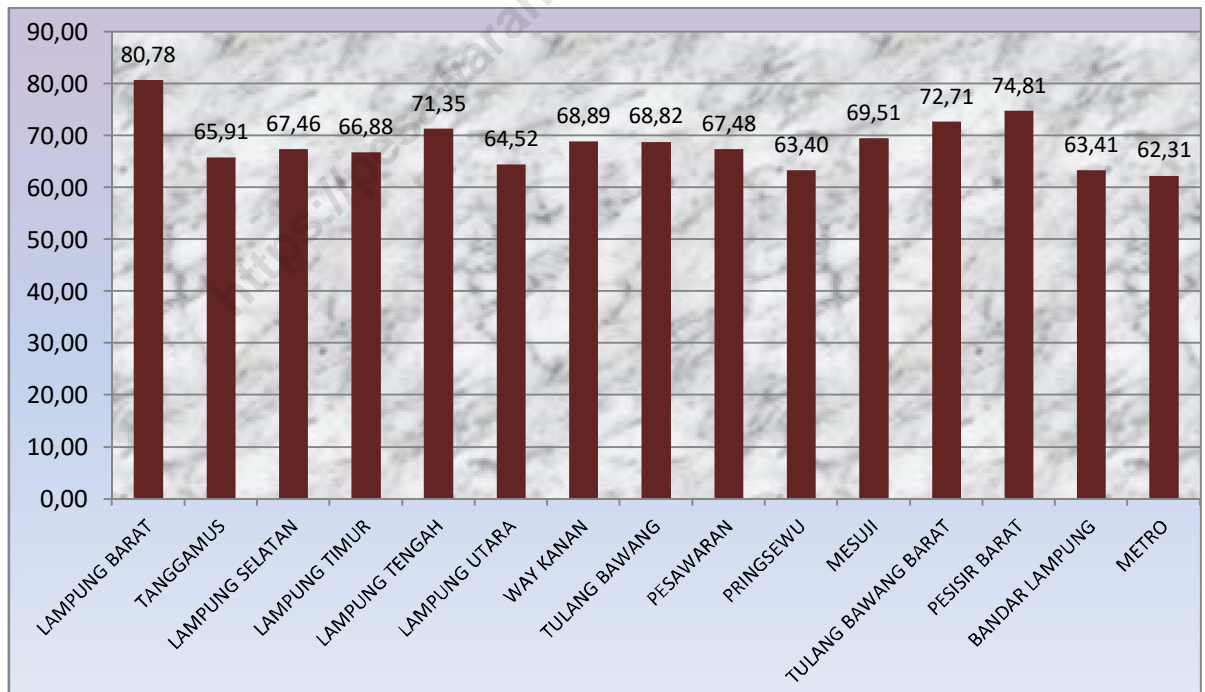
BAB 2

PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator atau ukuran yang sering dipakai untuk melihat partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau menganggur) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*Labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 1. Perbandingan TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018

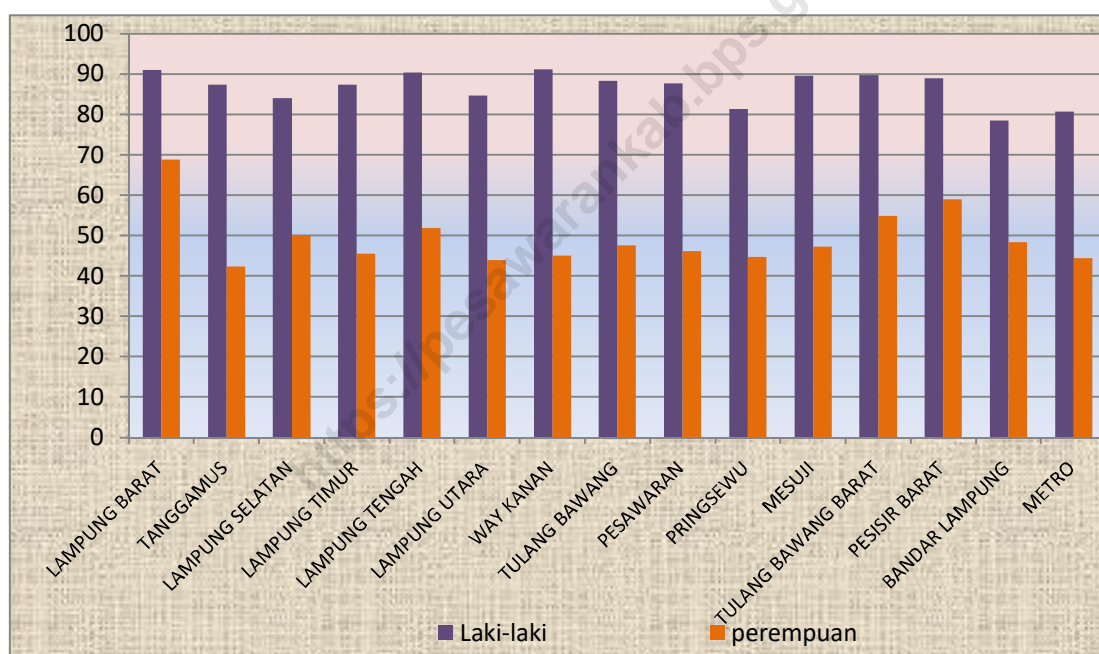


Berdasarkan Sakernas 2017, di Kabupaten Pesawaran jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja mencapai 211.407 penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari 199.288 penduduk bekerja, sedangkan sisanya yaitu 12.119 penduduk merupakan pengangguran terbuka. Tingkat

Partisipasi angkatan kerja Kabupaten Pesawaran sebesar 67,48 persen. Artinya, dari 100 penduduk umur 15 tahun keatas, sebanyak 67 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

TPAK Provinsi Lampung sebesar 67,83 persen. Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK tertinggi di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Barat, Pesisir barat, dan Tulang Bawang Barat, masing-masing memiliki TPAK sebesar 80,78 persen; 74,81 persen dan 72,71 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK terendah di Provinsi Lampung adalah Kota Metro, Pringsewu dan Bandar Lampung, masing-masing memiliki TPAK sebesar 62,31 persen; 63,40 persen dan 63,41 persen.

Grafik 2. Perbandingan TPAK Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2017

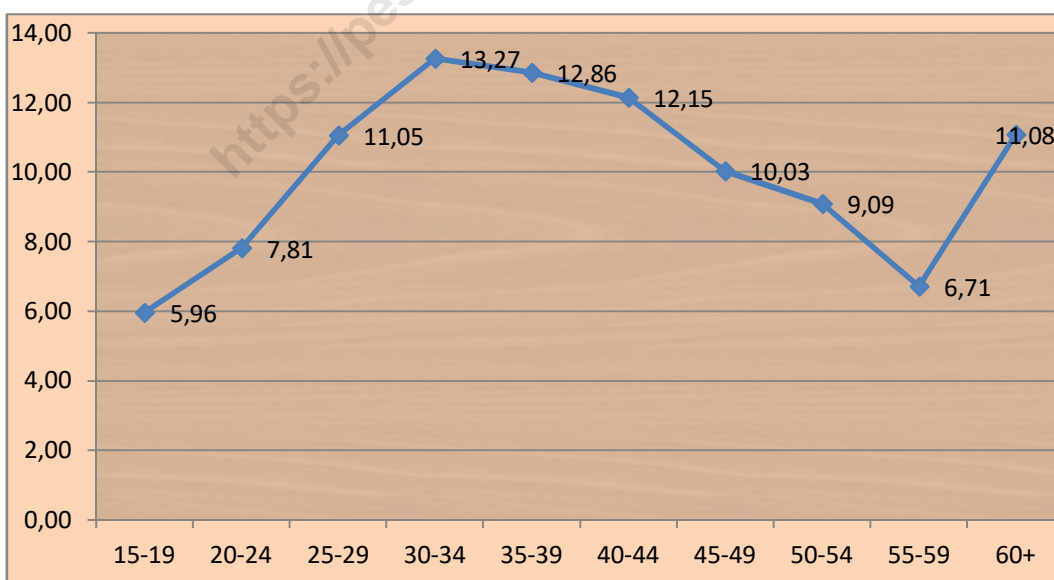


Secara umum, TPAK Laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki di Kabupaten Pesawaran adalah 87,59 persen. Sedangkan TPAK perempuan di Kabupaten Pesawaran adalah 46,10 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 88 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 46 orang yang termasuk angkatan kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah TPAK Laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah TPAK perempuan.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan antara TPAK Laki-laki dan perempuan adalah perempuan lebih banyak yang mengurus keluarga dan rumah tangga sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Besarnya perbedaan TPAK laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa masih terdapatnya kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin.

Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK laki-laki tertinggi di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Way Kanan, yaitu 91,17 persen, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK laki-laki terendah adalah Kota Bandar Lampung, yaitu 78,43 persen. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, TPAK tertinggi berada di Kabupaten Lampung Barat, yaitu 68,80 persen, dan TPAK perempuan terendah adalah Kabupaten Tanggamus, yaitu 42,27 persen. Sementara itu, secara umum TPAK Laki-laki Provinsi Lampung sebesar 86,28 persen, sedangkan TPAK Perempuan Provinsi Lampung sebesar 48,43 persen.

Grafik 3. Perbandingan TPAK menurut Kelompok umur di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017



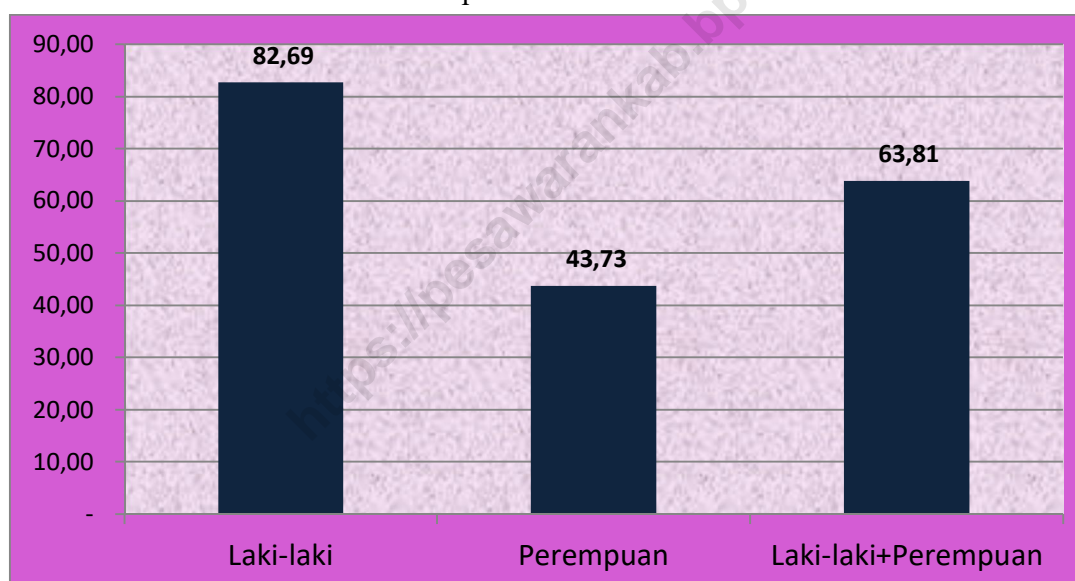
Berdasarkan kelompok umur biasanya memiliki pola dengan huruf “U” terbalik. TPAK kelompok umur muda (15-19 tahun) memiliki TPAK terendah, yaitu 5,96 persen. TPAK mengalami peningkatan sampai kelompok umur 30-34 tahun menjadi 13,27 persen. TPAK tersebut selanjutnya menurun sampai pada

kelompok umur 55-59 persen, menjadi 6,71 persen. Selanjutnya pada kelompok umur 60 tahun ke atas, TPAK di Kabupaten Pesawaran kembali meningkat menjadi 11,08 persen.

Hal diatas menjelaskan bahwa TPAK terendah berada pada kelompok umur muda yaitu pada umur 15-19 tahun, hal ini dikarenakan pada usia tersebut masih merupakan umur untuk bersekolah dan merasa belum mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah, sehingga pada kelompok umur ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja.

KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

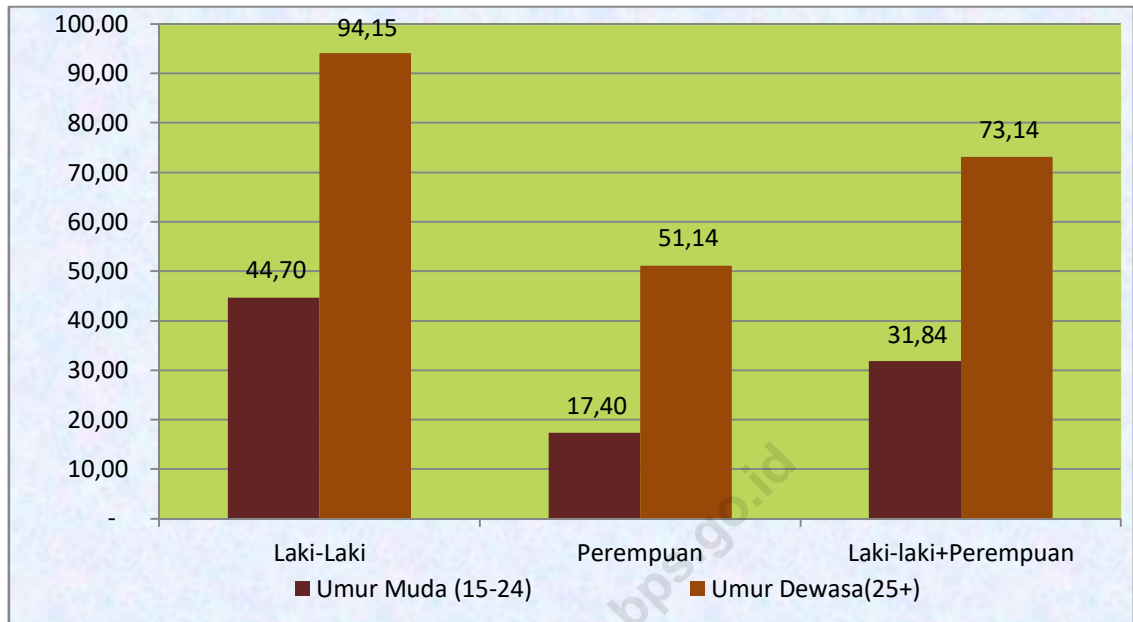
Grafik 4. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017



Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk atau *employment to population ratio* (EPR). Berdasarkan Sakernas Agustus 2017, Kabupaten Pesawaran memiliki angka EPR sebesar 63,81 persen. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 64 orang yang bekerja pada Agustus 2017.

Berdasarkan jenis kelamin, EPR Laki-laki lebih tinggi hampir dua kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan EPR Perempuan. Laki-laki memiliki EPR sebesar 82,69 persen, sedangkan perempuan memiliki EPR sebesar 43,73 persen.

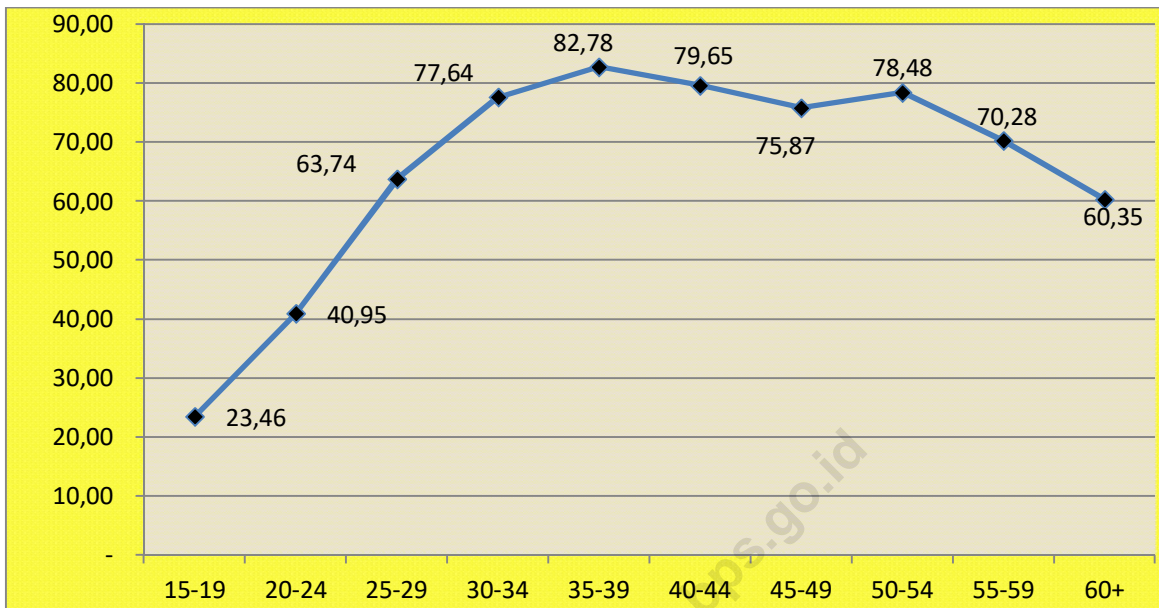
Grafik 5. Perbandingan Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk(EPR) berdasarkan Umur Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017



“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”

Berdasarkan grafik diatas, dapat dikatakan bahwa EPR penduduk kelompok umur muda selalu lebih rendah dari penduduk kelompok umur dewasa pada Agustus 2017. Kabupaten Pesawaran memiliki EPR sebesar 31,84 persen untuk penduduk umur muda, sedangkan untuk umur dewasa EPR nya sebesar 73,14 persen. Ditinjau dari jenis kelamin, EPR laki-laki memang selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk laki-laki, EPR umur muda sebesar 44,70 persen, sedangkan EPR umur dewasa sebesar 94,15 persen. Untuk perempuan, EPR umur muda sebesar 17,40 persen dan EPR umur dewasa sebesar 51,14 persen.

Grafik 6. Perbandingan Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk (EPR) berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017



“EPR tertinggi pada kelompok umur 35-40 tahun”

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa pola EPR berdasarkan kelompok umur cenderung seperti huruf “U” terbalik. Hal ini berarti bahwa pada kelompok umur muda, EPR relatif kecil, kemudian meningkat dan pada kelompok tua EPR akan kembali menurun.

Kelompok umur yang memiliki nilai EPR tertinggi adalah kelompok umur 35-39 tahun, yaitu 82,78 persen. Artinya, dari 100 penduduk umur 35-39 tahun yang merupakan angkatan kerja, 83 diantaranya bekerja. Hal ini dapat menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesawaran persentase penduduk yang bekerja paling banyak merupakan kelompok umur 35-39 tahun. Kelompok umur 30 -34 tahun sampai dengan 50-54 tahun memiliki nilai EPR yang cenderung stabil, yaitu berada diatas 70 persen, kemudian mengalami penurunan di kelompok umur 55-59 tahun dan kembali menurun di kelompok umur 60 tahun keatas.

KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

“Mayoritas pekerja di Kabupaten Pesawaran berstatus sebagai Buruh/karyawan/pegawai”

Berdasarkan Tabel dibawah ini, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status buruh/karyawan/pegawai sebesar 27,14 persen, diikuti dengan penduduk dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebesar 24,34 persen, dan urutan tiga yaitu status penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar sebesar 16,92 persen. Kemudian status sebagai pekerja tak dibayar sebesar 14,11 persen, pekerja bebas di non pertanian sebesar 10,81 persen sedangkan sisanya yaitu pekerja bebas di pertanian dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar/tetap/buruh dibayar masing-masing sebesar 4,73 persen dan 1,96 persen.

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2017

Status Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Total	199.288	100,00
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	48.504	24,34
Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar	33.713	16,92
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar/tetap/buruh dibayar	3.906	1,96
Buruh/karyawan/pegawai	54.083	27,14
Pekerja bebas dipertanian	9.424	4,73
Pekerja bebas di non pertanian	21.536	10,81
Pekerja tak dibayar	28.122	14,11

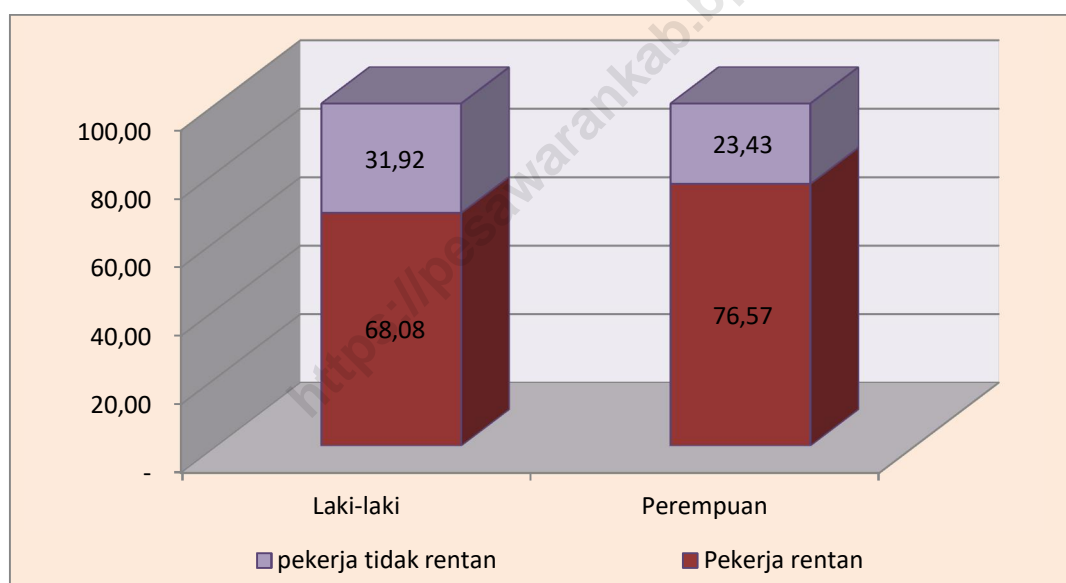
Khusus untuk pekerja rentan (*vulnerable employment*) mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja

keluarga pada Agustus 2017 mencapai 70,9 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 71 orang yang masuk kategori pekerja rentan.

‘Sebagian besar perempuan masuk kategori pekerja rentan’

Berdasarkan hasil Sakernas 2017, pada pekerja perempuan, proporsi pekerja rentan sebesar 76,57 persen, yang berarti bahwa hampir dua pertiga pekerja perempuan masuk kedalam kategori rentan. Sementara pada laki-laki tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 68,08 persen juga merupakan pekerja rentan.

Grafik 7. Perbandingan Pekerja rentan dan tak Rentan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

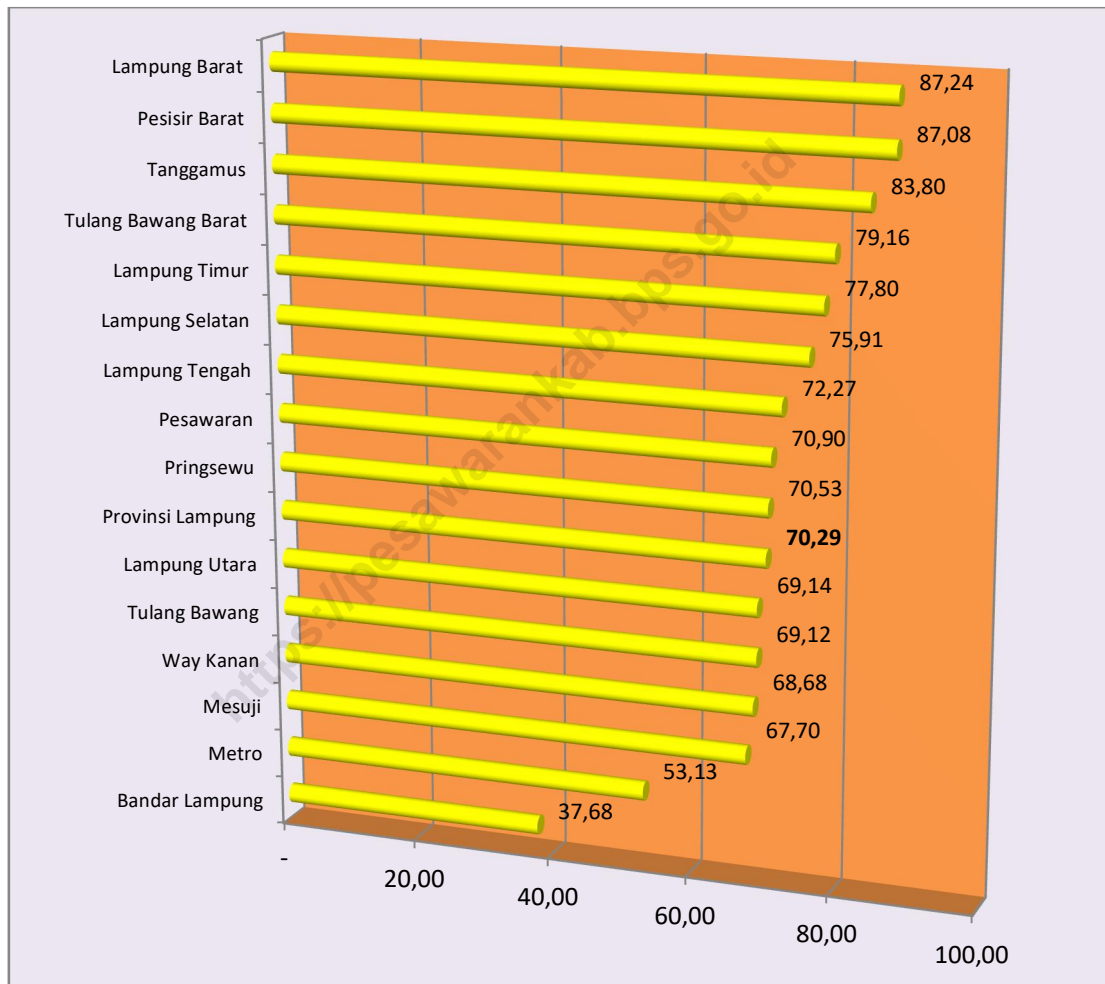


“Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten dengan persentase pekerja rentan tertinggi”

Kabupaten dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Agustus 2017, yaitu Kabupaten Lampung Barat, yakni 87,24 persen, Kabupaten Pesisir Barat yakni 87,08 persen, Kabupaten Tanggamus yakni 83,80 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang yakni 79,16 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang paling rendah pekerja rentan adalah Kota Bandar Lampung yakni 37,68 persen dan Kota

Metro yakni 53,13 persen. Sementara itu, secara keseluruhan Provinsi Lampung memiliki presentase pekerja rentan sebesar 70,29 persen, sedikit dibawah Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu yang masing-masing memiliki presentase pekerja rentan sebesar 70,90 persen dan 70,53 persen.

Grafik 8. Perbandingan Pekerja Rentan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017



KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
“Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian”

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2017 masih mempunyai pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu didominasi oleh sektor pertanian dengan persentase penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 40,22 persen. Selanjutnya adalah sektor jasa-jasa sebesar 37,34 persen, dan sektor manufaktur sebesar 22,43 persen.

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pertanian	80,160	40,22
Manufaktur	44.706	22,43
Pertambangan dan Penggalian	1.666	0,84
Industri	21.220	10,65
Listrik, Gas dan Air Minum	635	0,32
Konstruksi	21.185	10,63
Jasa-Jasa	74.422	37,34
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	39.544	19,84
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.471	4,75
Lembaga Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Jasa Perusahaan	609	0,31
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	24.798	12,44
Total	199.288	100,00

Dilihat berdasarkan masing-masing lapangan usaha, Lapangan usaha pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran, yaitu sebanyak 80.160 penduduk atau sebesar 40,22 persen. Kemudian penyumbang terbesar kedua adalah lapangan usaha

perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak 39.544 penduduk atau sebesar 19,84 persen, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 24.798 penduduk atau sebesar 12,44 persen.

Apabila ditinjau dari masing-masing sektor terutama pada sektor manufaktur, maka lapangan usaha industri merupakan lapangan usaha yang menyumbang paling banyak penyerapan tenaga kerja tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran. Terdapat 21.220 penduduk atau sebesar 10,65 persen penduduk yang bekerja pada lapangan usaha ini. Tak jauh dari itu, lapangan usaha konstruksi juga mendominasi dalam sumbangan sektor manufaktur, yaitu sebanyak 21.185 penduduk atau sebesar 10,63 persen penduduk yang bekerja di lapangan usaha ini. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha listrik, gas, dan air minum masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 1.666 penduduk dan 635 penduduk, atau sebesar 0,84 persen dan 0,32 persen.

Pada sektor jasa-jasa, lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi merupakan lapangan usaha yang mendominasi pada sektor jasa-jasa, dengan 39.544 penduduk atau sebesar 19,84 persen penduduk yang bekerja pada sektor ini. Kemudian disusul oleh lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 24.798 penduduk atau sebesar 12,44 persen. Sedangkan untuk lapangan usaha transportasi, pergudangan dan komunikasi hanya menyerap sebesar 9.471 penduduk atau sebesar 4,75 persen dan lapangan usaha lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan menyerap tenaga kerja sebesar 609 penduduk atau sebesar 0,31 persen.

Informasi sektoral biasanya berguna mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

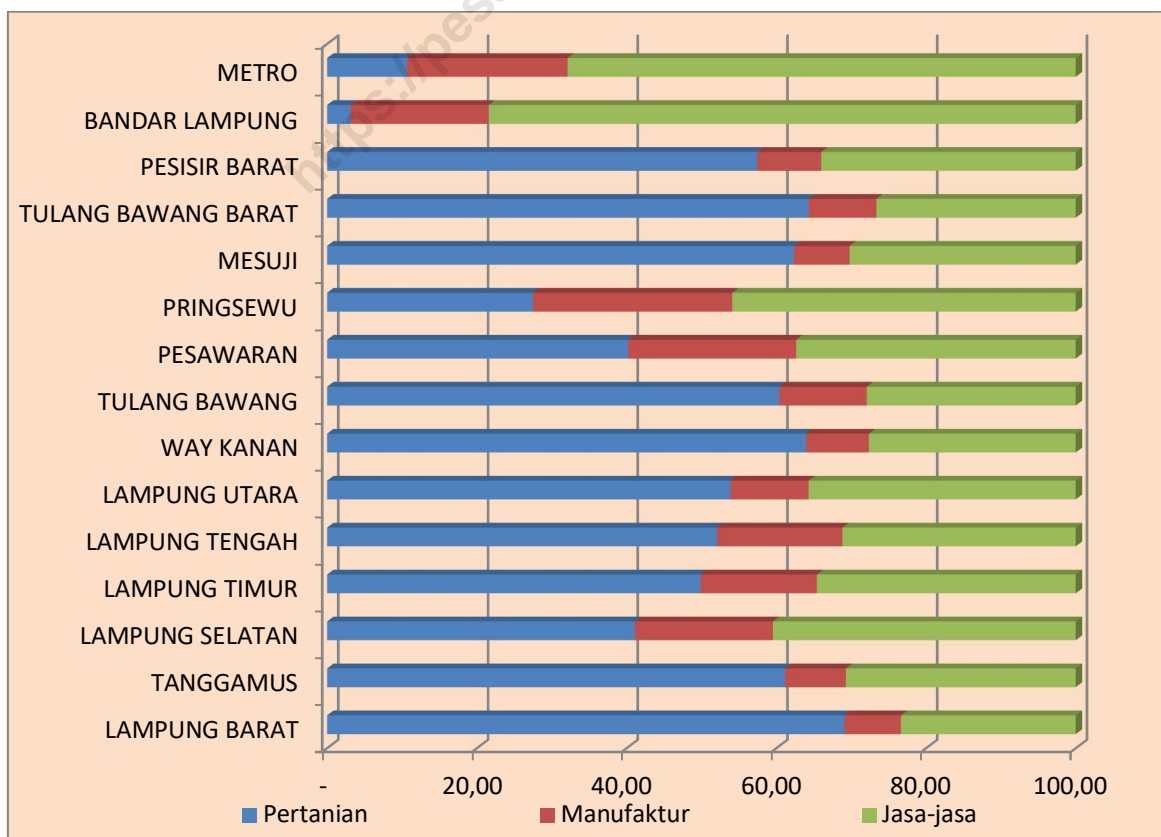
Secara umum, Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, terdapat 45,94 persen penduduk

bekerja di sektor pertanian, kemudian 39,07 persen bekerja di sektor jasa-jasa dan sisanya yaitu 14,98 persen bekerja di sektor Manufaktur.

“Pada Agustus 2017, kabupaten dengan persentase tertinggi yang penduduknya bekerja di sektor pertanian adalah Kabupaten Lampung Barat”

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2017 menurut kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor pertanian adalah Kabupaten Lampung Barat (69,11 persen), kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Kabupaten Pringsewu (26,65 persen) dan Kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Kota Bandar Lampung (78,41 persen).

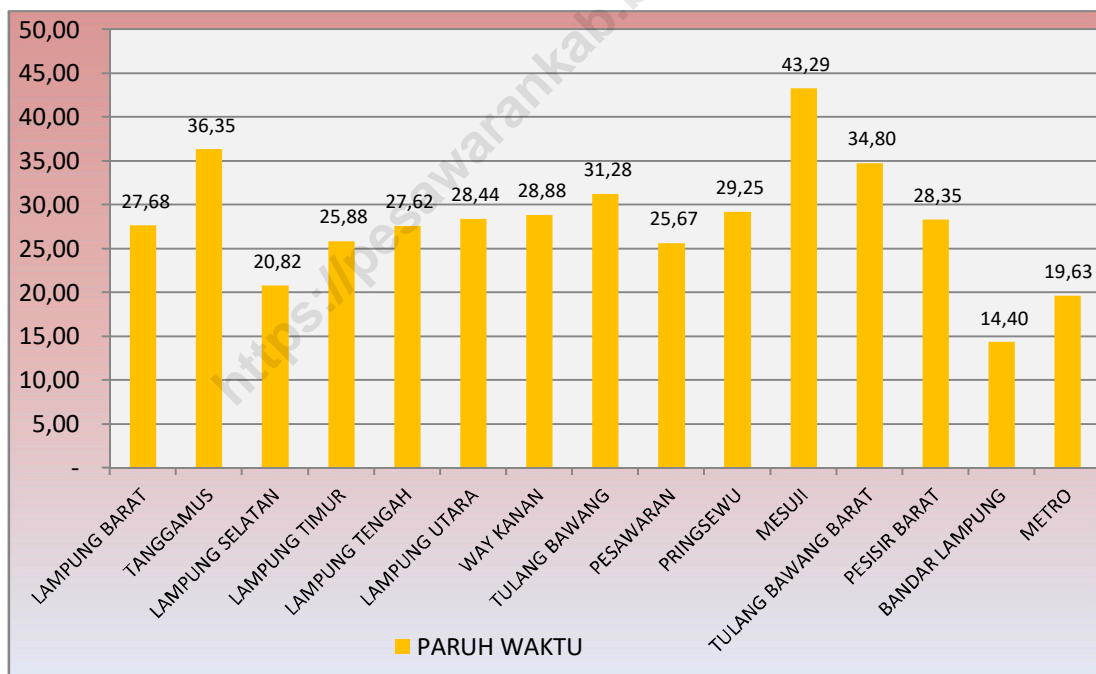
Grafik 9. Perbandingan penduduk umur 15 tahun yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Sektor lapangan usaha utama di Provinsi Lampung Tahun 2017



KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktifitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jam kerja kurang dari full time, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Grafik 10. Perbandingan Tingkat Pekerja Paruh Waktu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017



Pada Agustus 2017, tingkat pekerja paruh waktu Kabupaten Pesawaran mencapai 25,67 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat 26 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu tertinggi di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 43,29 persen dan Kabupaten Tanggamus sebesar 36,35 persen. Sedangkan Tingkat pekerja paruh waktu terendah di Provinsi Lampung adalah

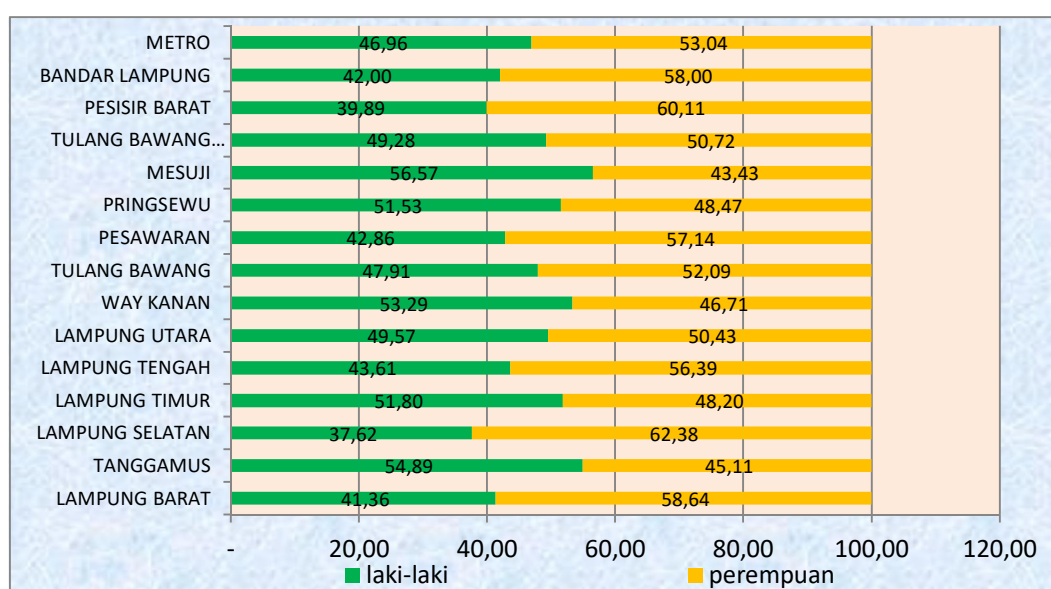
Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, masing-masing sebesar 14,40 persen dan 19,63 persen.

“ Tingkat pekerja paruh waktu Kabupaten Pesawaran sebesar 25,67 persen”

Ditinjau dari jenis kelamin, Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa secara umum, tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing –masing sebesar 52,70 persen dan 47,30 persen. Untuk Kabupaten Pesawaran, Tingkat pekerja paruh waktu juga didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 57,14 persen untuk perempuan dan 42,86 persen untuk laki-laki. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pekerja paruh waktu untuk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan adalah Kabupaten Mesuji, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten/kota yang memiliki *share* pekerja paruh waktu yang paling didominasi oleh perempuan adalah Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar 62,38 persen dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar 60,11 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki *share* pekerja paruh waktu yang paling banyak didominasi oleh laki-laki adalah Kabupaten Mesuji yaitu 56,57 persen dan Kabupaten Tanggamus sebesar 54,89 persen.

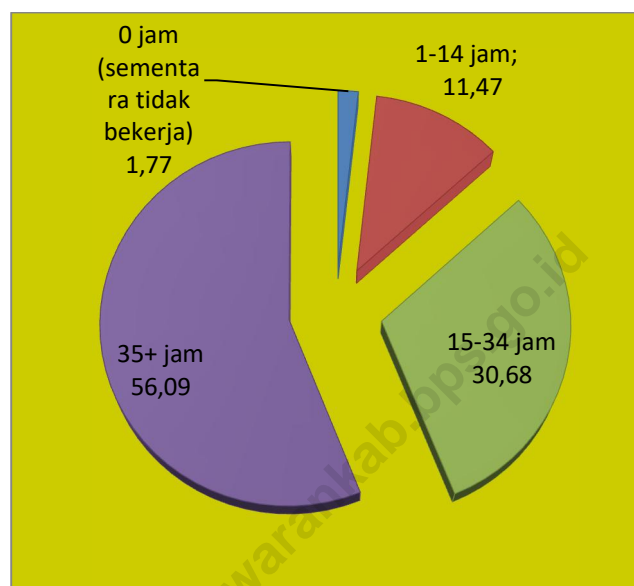
Grafik 11. Perbandingan Tingkat Pekerja Paruh Waktu berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017



KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

“Mayoritas penduduk bekerja di atas 35 jam dalam seminggu”

Grafik 12. Perbandingan Jumlah Jam kerja di Provinsi Lampung Tahun 2017



Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Tahun 2017 dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung sebagian besar memiliki jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Terdapat 56,09 persen penduduk yang bekerja di atas 35 jam selama seminggu terakhir. Kemudian 30,68 persen penduduk yang bekerja selama 15-34 jam dan sebesar 11,47 persen penduduk yang bekerja selama 1-14 jam. Sedangkan untuk penduduk yang sementara tidak bekerja sebesar 1,77 persen.

“Buruh/Karyawan/Pegawai yang memiliki jam kerja diatas 35 jam merupakan pekerja terbanyak di Provinsi Lampung ”

Berdasarkan tabel di bawah, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Lampung tahun 2017 paling banyak bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai yang memiliki jam kerja lebih dari 35 jam

dalam seminggu merupakan persentase terbesar penduduk bekerja, yaitu sebesar 20,54 persen. Artinya, dari 100 penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja, terdapat 20 penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.

Tabel 3. Perbandingan Status Pekerjaan Utama dengan Jam Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2017

Status Pekerjaan Utama	Jam Kerja			
	0 Jam (Sementara tidak Bekerja)	1-14 Jam	15-34 Jam	Lebih dari 35 Jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	0,42	1,83	5,49	9,87
Berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar	0,76	1,93	7,75	9,15
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar/tetap/buruh dibayar	0,12	0,26	0,52	2,00
Buruh/karyawan/pegawai	0,46	0,65	5,17	20,54
Pekerja bebas dipertanian	0,01	0,48	2,66	4,30
Pekerja bebas di non pertanian	-	0,41	1,49	6,11
Pekerja tak dibayar	-	5,92	7,59	4,12
Total	1,77	11,47	30,68	56,09

Pada kategori sementara tidak bekerja (jam kerja 0 jam dalam seminggu terakhir), status pekerjaan berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar merupakan status pekerjaan yang paling besar, yaitu sebesar 0,76 persen, kemudian disusul oleh

buruh/karyawan/pegawai sebesar 0,46 persen dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebesar 0,42 persen.

Pada kategori jam kerja 1-14 jam dalam seminggu, status pekerja tak dibayar merupakan status pekerjaan yang paling besar, yaitu 5,92 persen. Kemudian status pekerja berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar sebesar 1,93 persen dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebesar 1,83persen.

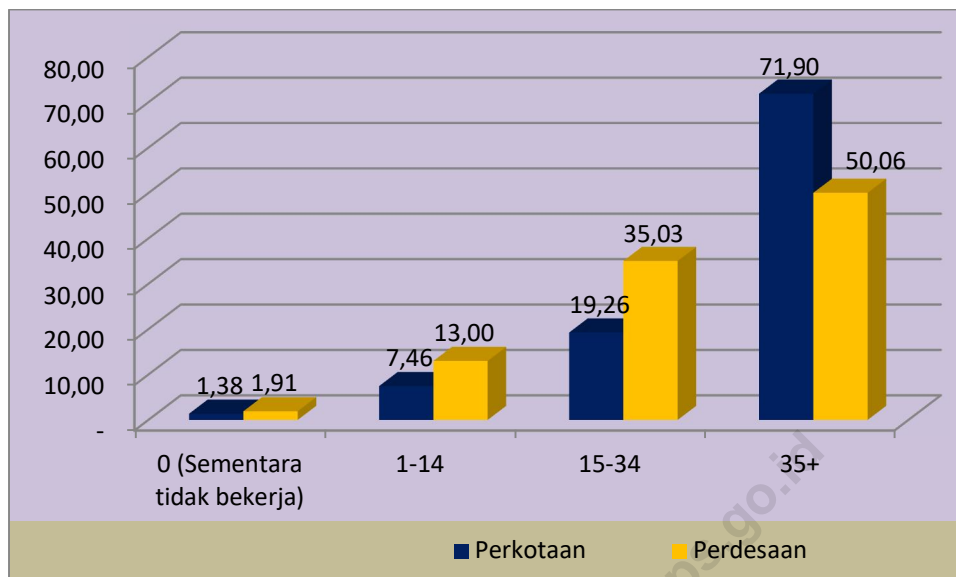
Pada kategori jam kerja 15-34 jam dalam seminggu, status pekerjaan yang paling banyak adalah berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar, yaitu sebesar 7,75 persen. Kemudian pekerja yang ak dibayar yaitu sebesar 7,59 persen, berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebesar 5,49 persen dan buruh/karyawan/pegawai sebesar 5,17 persen.

Sementara itu, pada kategori jam kerja terbanyak yaitu lebih dari 35 jam selama seminggu, status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai merupakan status pekerjaan yang paling besar yaitu sebesar 20,54 persen, Kemudian berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain sebesar 9,87 persen dan berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar sebesar 9,15 persen.

“Penduduk perkotaan lebih banyak yang bekerja di atas 35 jam per minggu dibanding penduduk pedesaan”

Apabila di amati lebih lanjut pada grafik 14 dibawah ini, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja dalam seminggu antar penduduk yang bekerja di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan. Penduduk di pedesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah pedesaan mencapai 49,94 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 28,10 persen.

Grafik 13. Perbandingan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dengan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung Tahun 2017



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata jam kerja di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan jam kerja di daerah pedesaan. Di Daerah perkotaan, jam kerja dalam seminggu lebih dari 35 jam mencapai 71,90 persen, sedangkan di daerah pedesaan hanya sebesar 50,06 persen. Sementara untuk jam kerja antara 15 sampai dengan 34 jam dalam seminggu, di daerah perkotaan terdapat sebesar 19,26 persen dan di daerah pedesaan sebesar 35,03 persen.

KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal,

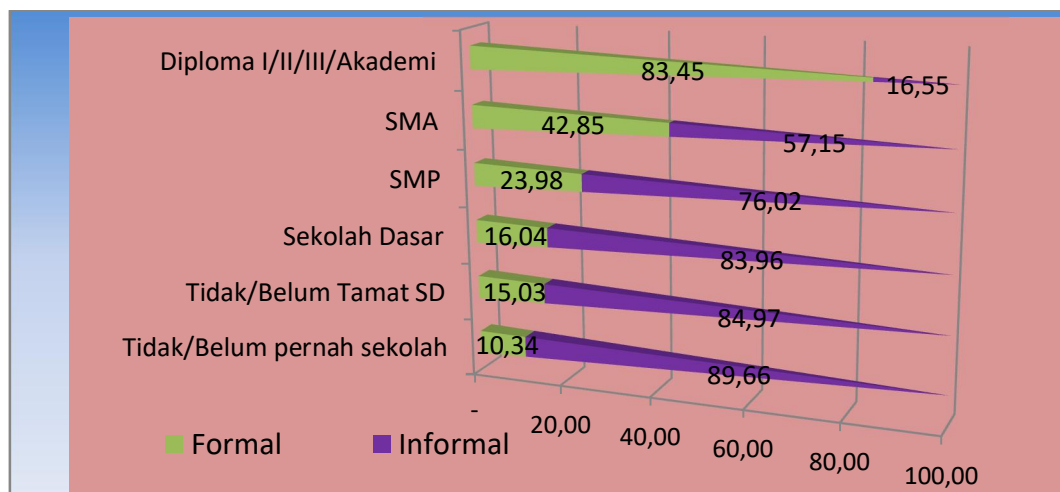
terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder.

Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal. Pada Sas 2017, konsep pekerja di Sektor Informal didekati dengan status pekerjaan, dimana status pekerjaan berkode 3 dan 4 yaitu berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar/tetap/buruh dibayar dan pekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dikategorikan sebagai pekerja formal, selebihnya yaitu berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain(kode 1), berusaha dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar (kode 2), dan pekerja bebas dikategorikan sebagai pekerja informal.

“Mayoritas penduduk di Provinsi Lampung bekerja di sektor informal yaitu 70,29 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa dari 3.896.230 Penduduk Provinsi Lampung yang bekerja, terdapat 2.738.535 penduduk yang bekerja di sektor informal, sedangkan sisanya yaitu 1.157.695 penduduk bekerja di sektor formal. Dengan demikian, Pekerja informal di Provinsi Lampung hampir tiga kali lebih besar dibandingkan pekerja formal. Terdapat 70,29 persen pekerja di Provinsi Lampung merupakan pekerja informal, sedangkan sisanya yaitu 29,71 persen merupakan pekerja formal.

Grafik 14. Persentase Pekerja Formal dan Informal Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung Tahun 2017



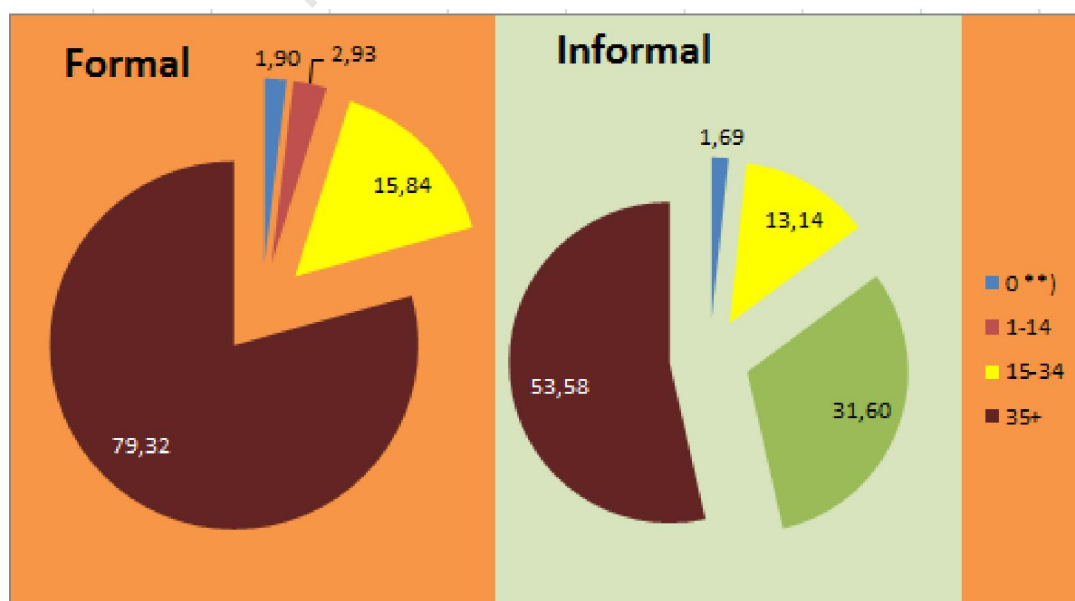
“Pekerja dengan Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi mayoritas bekerja di Sektor Formal”

Berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan yang ditamatkan, hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa sektor formal didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu mencapai 83,45 persen. Sedangkan Sektor Informal lebih banyak didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah SMP.

Pekerja dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada sektor informal sebanyak 57,15 persen, sedangkan sisanya yaitu 42,85 persen bekerja di sektor formal. Untuk pekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 76,02 persen bekerja di sektor informal, sedangkan sisanya yaitu 23,98 persen bekerja di sektor formal. Sementara itu, pekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, 83,96 persen bekerja di sektor informal sedangkan sisanya 16,04 persen bekerja di sektor formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar berpeluang di sektor formal.

“Pekerja di sektor Formal mempunyai jam kerja lebih banyak dibandingkan Pekerja Informal”

Grafik 15. Perbandingan Jam kerja pada Sektor Formal dan Informal di Provinsi Lampung Tahun 2017

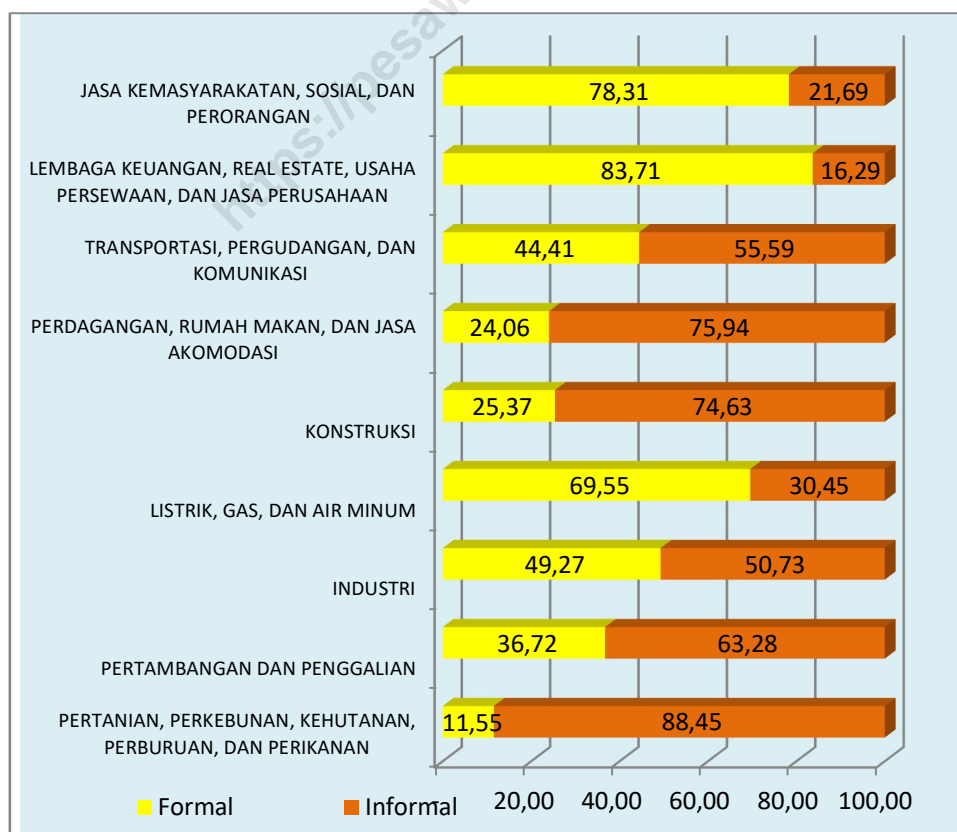


Berdasarkan Sakernas Agustus 2017 seperti yang tampak pada grafik 16 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja pada sektor formal lebih banyak memiliki jam kerja dalam seminggu dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor informal. Terdapat 79,32 persen penduduk yang bekerja di sektor formal memiliki jam kerja diatas 35 jam dalam seminggu, sedangkan pekerja informal hanya sebesar 53,58 persen. Artinya, dari 100 pekerja Formal dan Informal yang bekerja di Provinsi Lampung, terdapat 79 pekerja formal dan 54 pekerja informal yang bekerja diatas 35 jam dalam seminggu.

Untuk jam kerja antara 15-34 jam selama seminggu, terdapat 15,84 persen pekerja formal dan 13,14 persen pekerja informal. Sementara itu, untuk pekerja yang sementara tidak bekerja, terdapat 1,90 persen merupakan pekerja formal dan 1,69 persen pekerja informal.

“ Sektor Informal didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di Pertanian”

Grafik 16. Perbandingan Pekerja di Sektor Formal dan Informal Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Lampung Tahun 2017



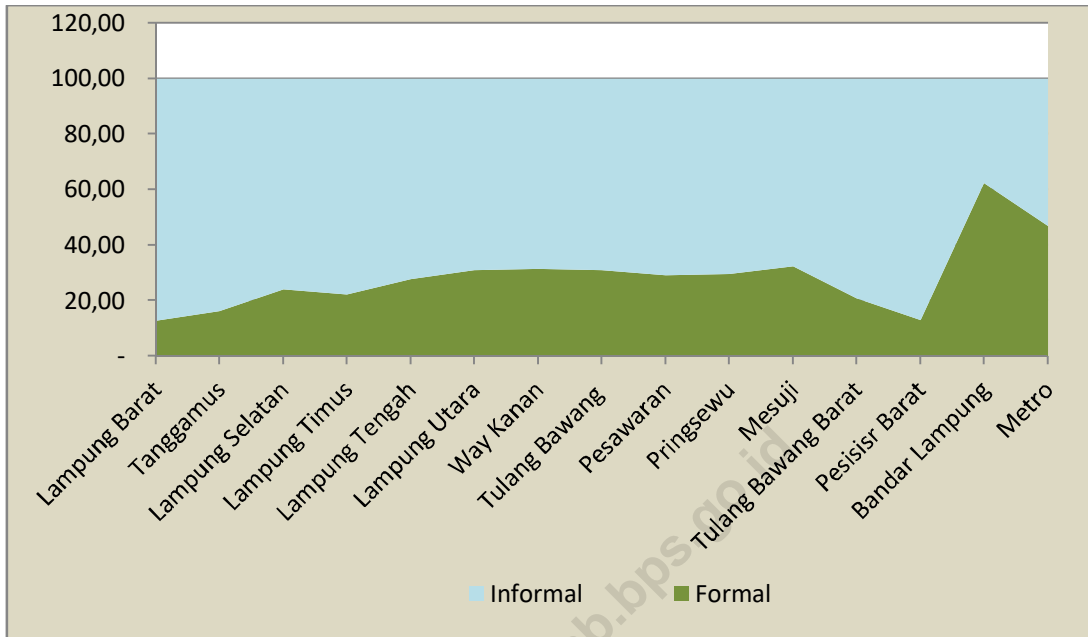
Berdasarkan grafik di atas, dapat dibedakan pekerja pada sektor formal dan informal berdasarkan jenis lapangan usahanya. Sektor formal didominasi pada tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa-jasa, sedangkan sektor informal didominasi pada tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.

Pekerja Formal didominasi oleh pekerja yang bekerja di lapangan usaha lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan yakni sebesar 83,71 persen; jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan yakni sebesar 78,31 persen; listrik, gas dan air minum sebesar 69,55 persen. Sedangkan pekerja informal didominasi oleh pekerja yang bekerja di lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni sebesar 88,45 persen; perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 75,94 persen; konstruksi sebesar 74,63 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 63,28 persen.

“Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal”

Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per kabupaten, ternyata kabupaten yang mendominasi sektor informal lebih banyak. Tiga peringkat dengan persentase pekerja informal tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Barat (87,24 persen), Kabupaten Pesisir Barat (87,08 persen), dan Kabupaten Tanggamus (83,80 persen). Sementara kabupaten dengan persentase tertinggi pada sektor formal adalah Kota Bandar Lampung (62,32 persen), Kota Metro (46,87 persen) dan Kabupaten Mesuji (32,30 persen). Sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat penduduk yang bekerja di sektor informal tertinggi keempat sebaliknya dengan sektor formal berada terendah keempat artinya di Kabupaten Way Kanan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak daripada formal.

Grafik 17. Perbandingan Pekerja Formal dan Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017



BAB 3

INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. PENGANGGURAN

“Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesawaran sebesar 6,08 persen”

Seperti yang terlihat pada Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Sakernas Agustus 2017 di Kabupaten Pesawaran mencapai 6,08 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa TPT laki-laki di Kabupaten Pesawaran lebih besar dibandingkan dengan TPT perempuan. Pada tahun 2017, TPT Laki-laki sebesar 6,25 persen sedangkan TPT Perempuan sebesar 5,74 persen.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

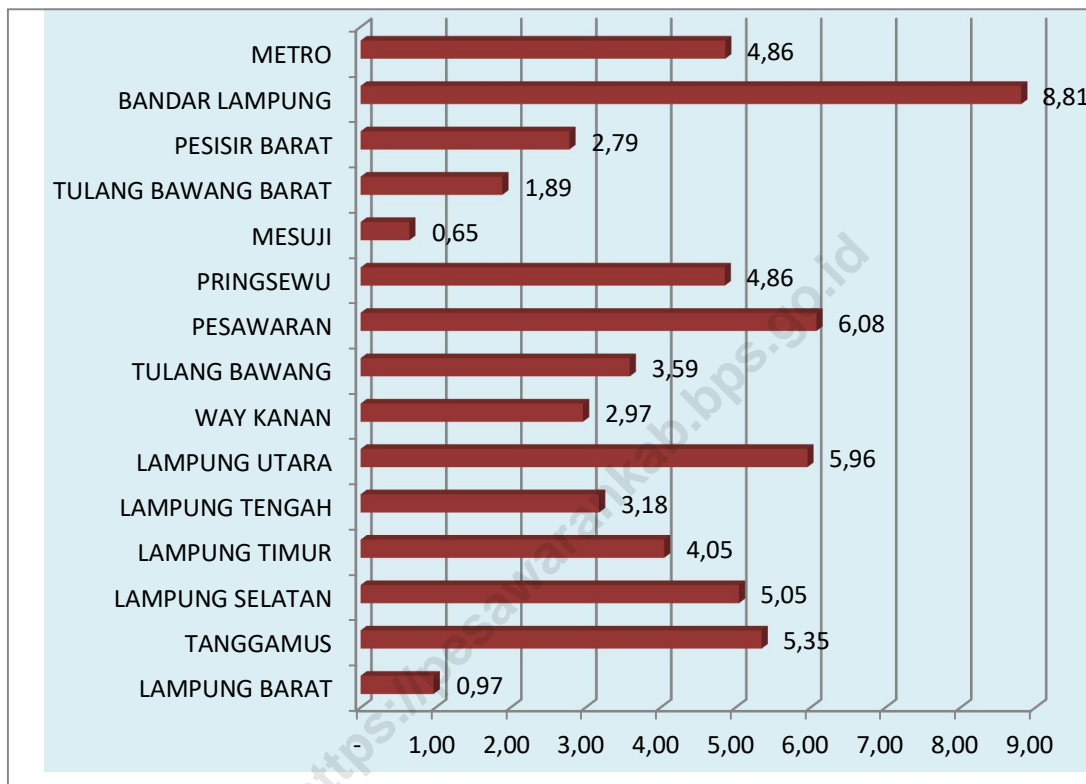
Kategori	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jumlah Penduduk Bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	8.319	133.112	6,25
Perempuan	3.800	66.176	5,74
Pesawaran	12.119	199.288	6,08

“TPT tertinggi ada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran”

Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa TPT tertinggi menurut Kabupaten/Kota diduduki oleh Kota Bandar Lampung (8,81 persen), Kabupaten Pesawaran (6,08 persen), Kabupaten Lampung Utara (5,96 persen) dan Kabupaten Tanggamus (5,35). Sebaliknya, Kabupaten/Kota dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Agustus 2017 diduduki oleh Kabupaten Mesuji dengan TPT sebesar 0,65 persen, kemudian posisi kedua diduduki oleh Kabupaten

Lampung Barat dengan TPT sebesar 0,97 persen, dan posisi ketiga diduduki Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan TPT sebesar 1,89 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 18. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017

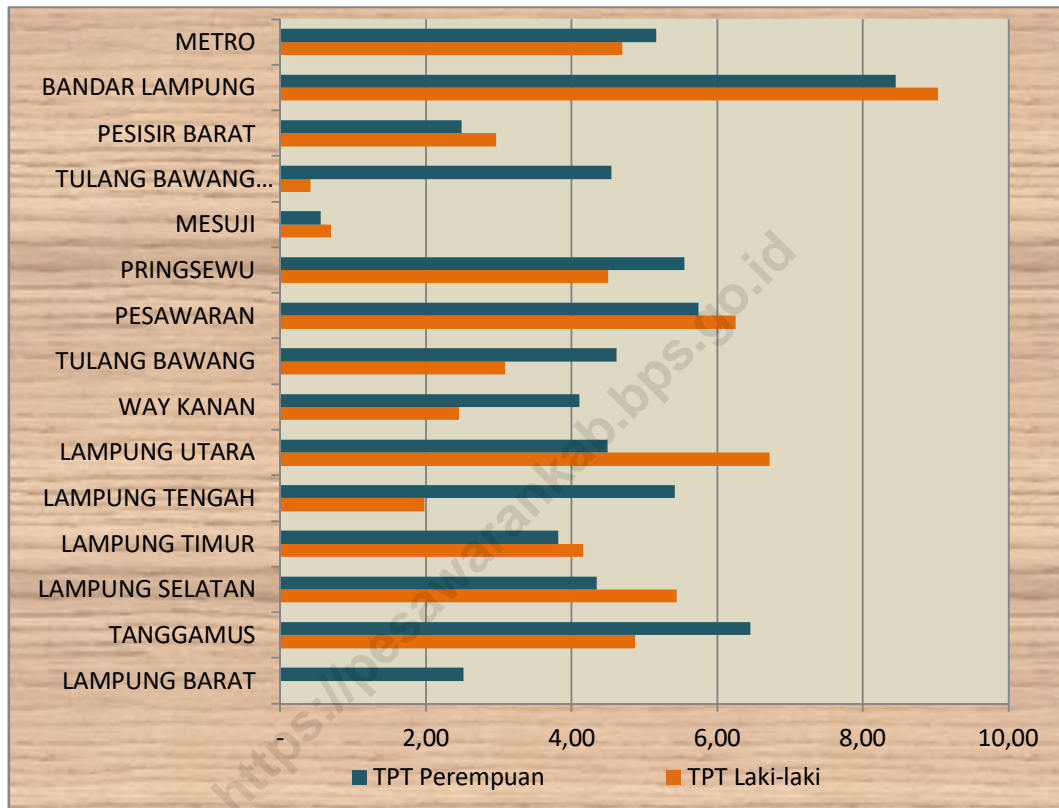


Berdasarkan jenis kelamin, secara umum rata-rata TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT Laki-laki. TPT Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 4,52 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, terdapat 5 penduduk yang merupakan pengangguran. Menurut jenis kelamin, Tingkat pengangguran terbuka perempuan Provinsi Lampung sebesar 5,03 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki sebesar 4,25 persen.

Secara umum, TPT Perempuan lebih besar dibandingkan dengan TPT Laki-laki. Kabupaten/Kota yang memiliki TPT perempuan lebih besar dibandingkan dengan TPT laki-laki adalah Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Sementara Kabupaten/Kota lainnya memiliki TPT Laki-laki yang lebih besar.

Grafik. 19. Perbandingan TPT Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2017

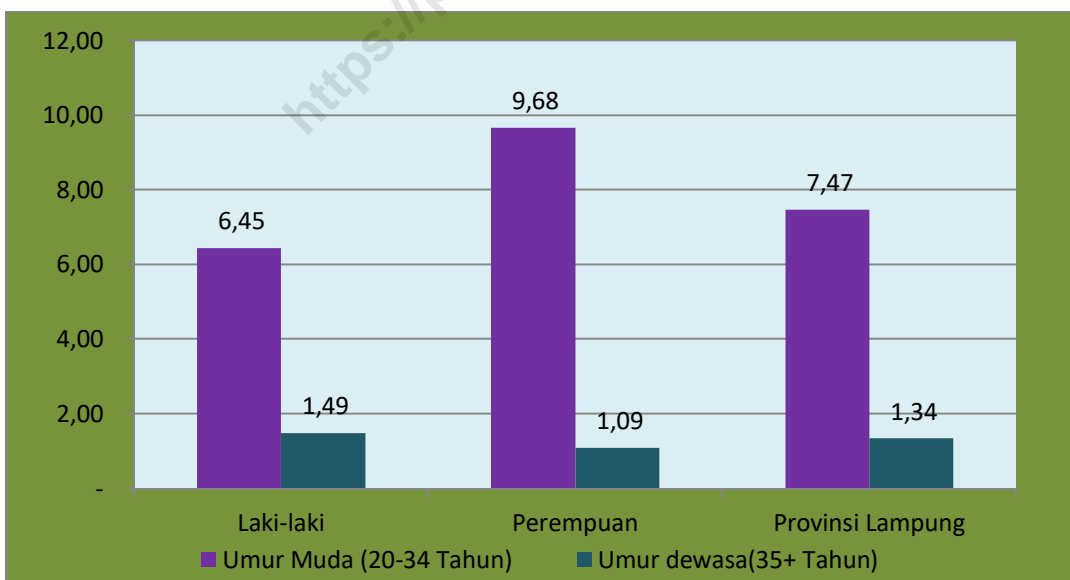


KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak Kabupaten/Kota yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “umur muda” mencakup orang yang berumur 20 sampai dengan 34 tahun, sedangkan “umur dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berumur 35 tahun keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran kaum muda;
2. Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
3. Share pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
4. Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Grafik 20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2017

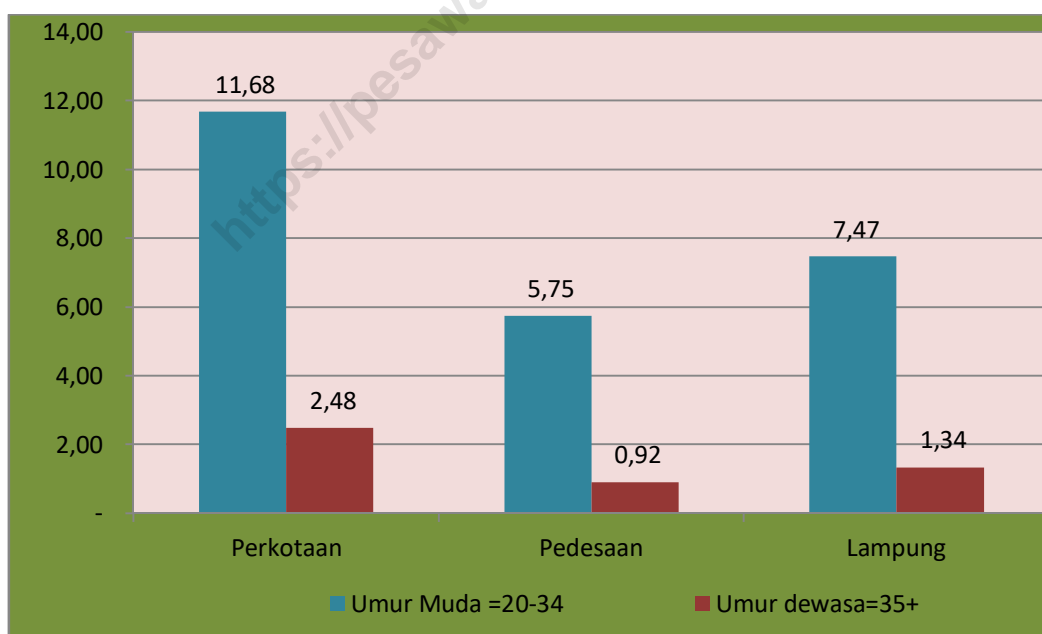


Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, secara umum TPT pada umur muda lebih tinggi dibandingkan TPT pada umur dewasa. TPT penduduk Provinsi

Lampung pada kelompok umur muda mencapai 7,47 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 20-34 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang yang menganggur. Sedangkan TPT pada umur dewasa sebesar 1,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 35 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 1 orang yang menganggur.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, TPT umur muda pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT umur muda laki-laki. Pada perempuan, TPT umur muda sebesar 9,68 persen, dan TPT umur dewasa sebesar 1,09 persen. Sedangkan TPT umur muda laki-laki sebesar 6,45 persen dan pada umur dewasa sebesar 1,49 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan umur muda yaitu umur 20-35 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada laki-laki di umur yang sama.

Garfik 21. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung Tahun 2017



“TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding pedesaan”

Ditinjau lebih lanjut, berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan lebih

tinggi daripada di daerah pedesaan. TPT umur muda daerah perkotaan sebesar 11,68persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk umur 20-35 tahun yang merupakan angkatan kerja, terdapat 12 penduduk yang menganggur. Sedangkan TPT umur muda di daerah pedesaan cenderung lebih rendah bahkan kurang dari setengah TPT umur muda diperkotaan. TPT umur muda di daerah pedesaan sebesar 5,75 persen.

Sementara itu, TPT Umur dewasa di daerah perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. TPT umur dewasa di daerah perkotaan hampir 3 kali lipat dibandingkan TPT didaerah pedesaan. TPT umur dewasa di daerah perkotaan adalah sebesar 2,48 persen sedangkan TPT umur dewasa di daerah pedesaan sebesar 0,92 persen.

KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

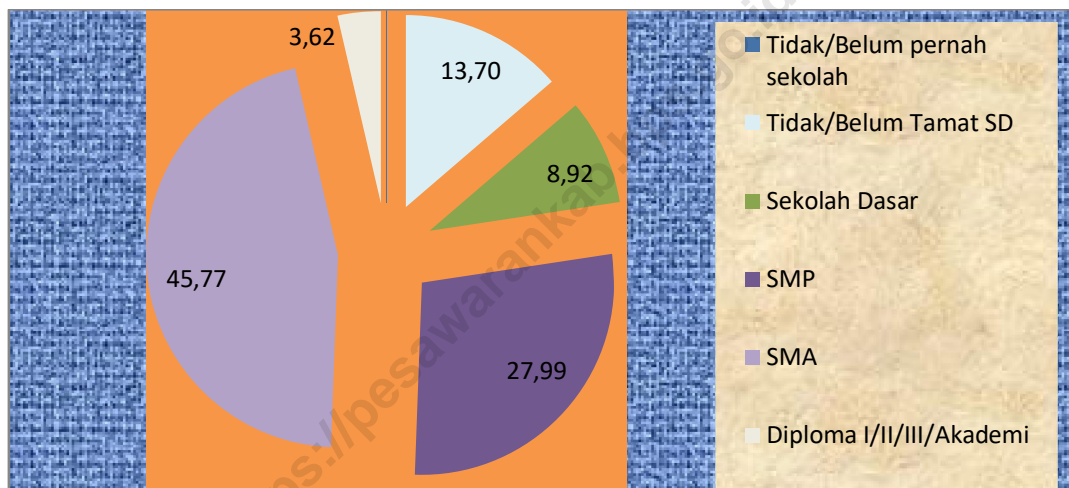
Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (low skilled job) di dalam negeri. Selain itu, apabila share pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi dapat menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

“TPT tertinggi di Kabupaten Pesawaran Menurut Tingkat Pendidikan terdapat pada Sekolah Menengah Atas” ■

Mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada grafik di atas, memberikan gambaran mengenai suplai tenaga kerja yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, TPT tertinggi Di

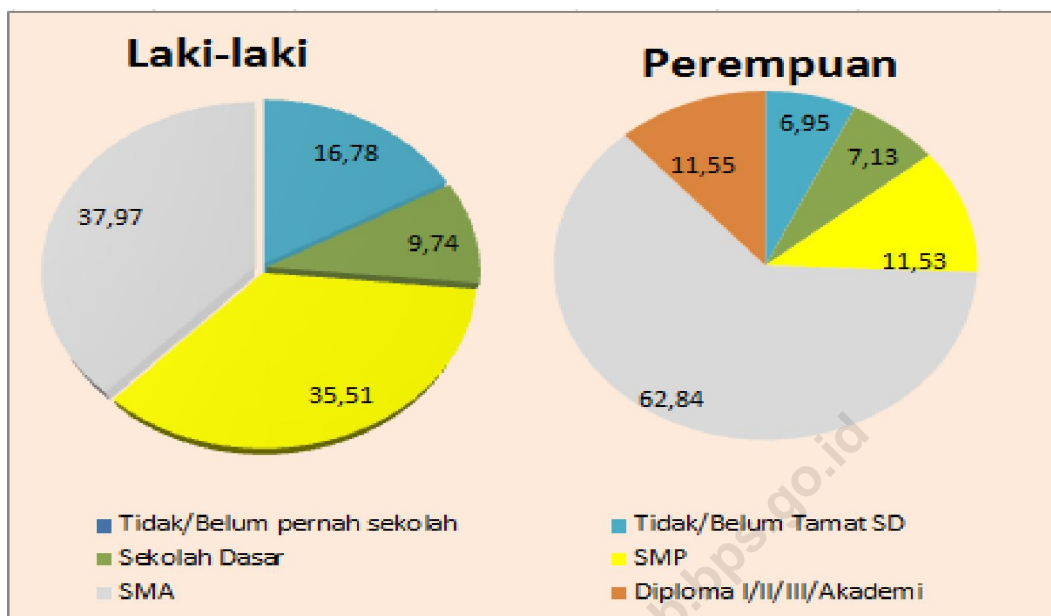
Kabupaten Pesawaran menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah atas yaitu sebesar 45,77 persen. Artinya, dari 100 penduduk umur 15 tahun keatas yang merupakan pengangguran terbuka, 46 diantaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah pengangguran di Kabupaten Pesawaran merupakan lulusan SMA. Ini berarti suplai tenaga kerja yang berada di Kabupaten Pesawaran, kebanyakan yang tidak terserap merupakan lulusan SMA.

Grafik 22. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017



TPT tertinggi kedua menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 27,99 persen, kemudian Tidak/Belum tamat SD sebesar 13,70 persen dan hanya sebesar 3,62 persen yang merupakan TPT dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III/Akademi. Sedangkan untuk tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah merupakan TPT terkecil di Kabupaten Pesawaran.

Garfik 23. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017



“TPT perempuan didominasi oleh Penduduk yang Pendidikan Tertingginya adalah SMA”

Berdasarkan jenis kelamin, TPT Perempuan didominasi oleh Penduduk dengan lulusan SMA, yaitu sebesar 62,84 persen. Artinya, dari 100 penduduk perempuan yang menganggur, 63 diantaranya merupakan lulusan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang paling banyak tidak terserap adalah Tenaga kerja perempuan dengan pendidikan yang pernah ditamatkannya adalah SMA

Lain halnya dengan TPT pada laki-laki yang didominasi oleh lulusan SMA dan SMP, yaitu masing-masing sebesar 37,97 persen dan 35,51 persen. Artinya, dari 100 penduduk laki-laki yang menganggur, 38 penduduk merupakan lulusan SMA dan 36 penduduk merupakan lulusan SMP.

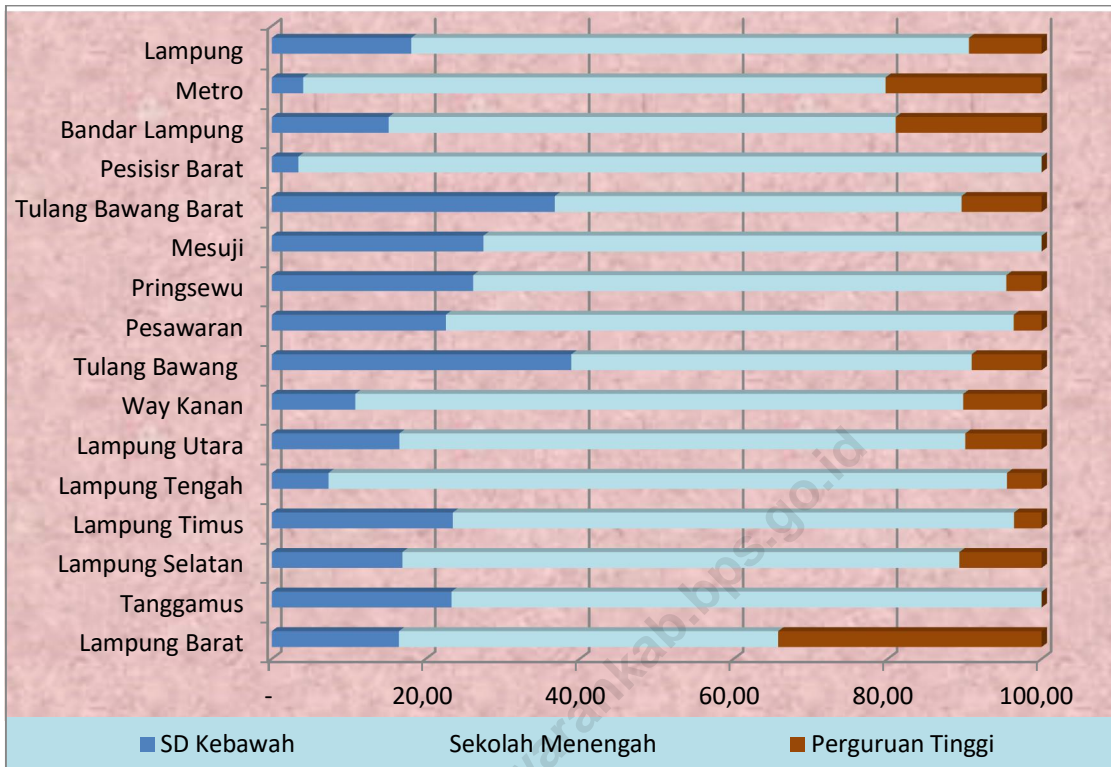
TPT yang pendidikannya berupa tidak/belum pernah sekolah didominasi oleh laki-laki, yakni mencapai 16,78 persen sedangkan untuk perempuan hanya sebesar 6,95 persen. Untuk jenjang tamatan Sekolah Dasar, laki-laki juga lebih mendominasi, yakni sebesar 9,74 persen dan 7,13 persen untuk perempuan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma atau universitas, Perempuan mendominasi berperan sebagai pengangguran terbuka dibandingkan laki-laki.

Terdapat 11,55 persen perempuan yang merupakan pengangguran terbuka dengan pendidikan yang pernah ditamatkan adalah Diploma/Universitas. Sedangkan untuk laki-laki tidak ada pengangguran terbuka dengan pendidikan yang pernah ditamatkan adalah Diploma/Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perempuan menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama.

“Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji adalah tiga kabupaten dengan persentase pengangguran berpendidikan rendah paling tinggi”

Grafik dibawah ini menunjukkan urutan Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu Kabupaten Tulang Bawang (38,91 persen), Kabupaten Tulang Bawang Barat (36,76 persen) dan Kabupaten Mesuji (27,50 persen). Sedangkan tiga Kabupaten dengan persentase pengangguran tertinggi yang berpendidikan menengah secara berturut-turut yaitu Kabupaten Pesisir Barat (96,55 persen), Kabupaten Lampung Tengah (88,14 persen), dan Kabupaten Way Kanan (78,97 persen). Serta tiga provinsi dengan persentase pengangguran tertinggi yang berpendidikan Perguruan Tinggi secara berturut-turut yaitu Lampung Barat (34,22 persen), Kota Metro (20,27 persen), dan Kota Bandar Lampung (18,96 persen).

Grafik 24. Perbandingan Penganggur menurut Jenjang Pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Lampung Tahun 2017



KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

“Jumlah setengah penganggur di Kabupaten Pesawaran mencapai 17.205 penduduk dan didominasi oleh Laki-laki”

Jumlah setengah penganggur di Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sakernas Agustus 2017, mencapai 17.205 penduduk, yang terdiri dari 13.533 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3.672 penduduk adalah perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah pekerja setengah

menganggur laki-laki di Kabupaten Pesawaran hampir empat kali lipat jumlah pekerja setengah menganggur perempuan.

Tabel 5. Penduduk umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jumlah Setengah Menganggur	Persentase
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	13.533	78,66
Perempuan	3.672	21,34
Pesawaran	17.205	100,00

Berdasarkan Sakernas Agustus 2017, Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang merupakan Angkatan Kerja di Kabupaten Pesawaran adalah 211.407 penduduk. Jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari angkatan kerja laki-laki sebanyak 141.431 penduduk dan angkatan kerja perempuan sebanyak 69.976 penduduk.

Dari penduduk yang merupakan angkatan kerja, terdapat 199.288 penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja terdiri dari 133.112 pekerja laki-laki dan sisanya yaitu 66.176 pekerja perempuan. Dari penduduk yang bekerja, terdapat penduduk yang merupakan pekerja setengah menganggur, yaitu pekerja yang jam kerjanya dibawah ambang batas normal yaitu kurang dari 35 jam dalam seminggu, dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Di Kabupaten Pesawaran terdapat 17.205 penduduk yang merupakan pekerja setengah menganggur.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2017 di Kabupaten Pesawaran sebesar 8,14 persen yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, persentase setengah penganggur untuk laki-laki lebih hampir dua kali lipat dibandingkan persentase setengah penganggur

perempuan. Dari total angkatan kerja, pada laki-laki terdapat 9,57 persen merupakan setengah penganggur dan setengah penganggur perempuan sebesar 5,25 persen.

Untuk persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja, terdapat 8,63 persen setengah penganggur di Kabupaten Pesawaran. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas dan telah bekerja, 9 diantaranya merupakan setengah penganggur atau memiliki jam kerja dibawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang merupakan setengah penganggur cenderung 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Terdapat 10,17 persen penduduk setengah penganggur laki-laki dan 5,55 persen setengah penganggur perempuan.

Tabel 6. Perbandingan persentase setengah penganggur dengan angkatan kerja dan Penduduk Bekerja di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

Indikator	Persentase setengah penganggur terhadap Total Angkatan Kerja	Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	9,57	10,17
Perempuan	5,25	5,55
Pesawaran	8,14	8,63

“Persentase setengah penganggur paling tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat”

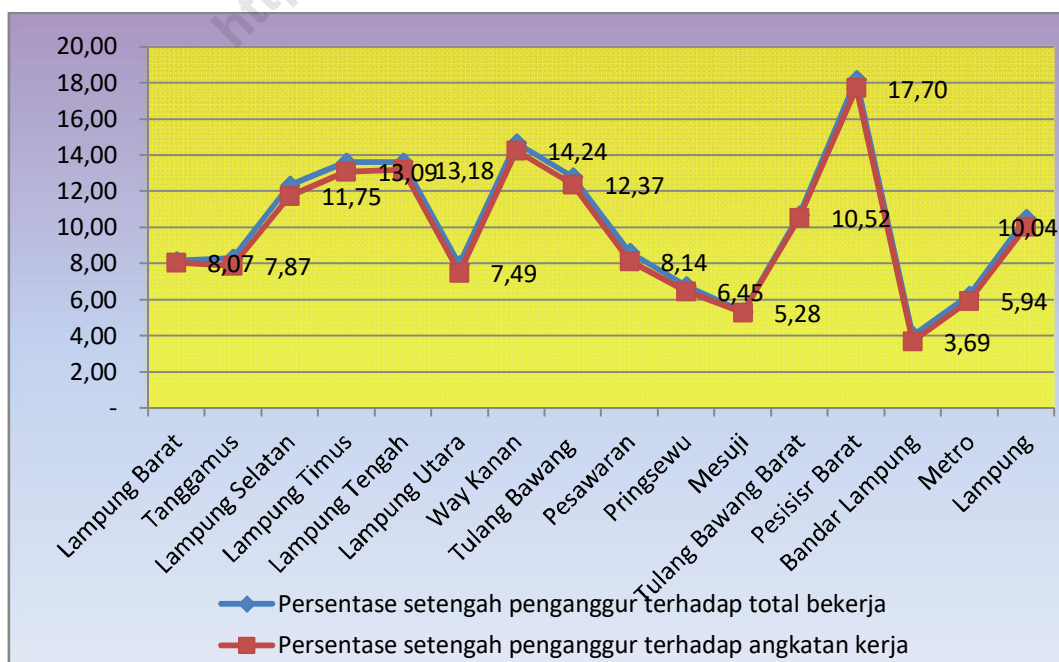
Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2017, persentase setengah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja atau penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung masing-masing sebesar 10,04 persen dan 10,49 persen. Artinya, dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, terdapat 10 pekerja yang setengah penganggur dan dari 100 penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 10 diantaranya juga merupakan pekerja setengah penganggur.

Berdasarkan Kabupaten/Kota yang berada di Lampung, Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten yang memiliki pekerja setengah penganggur terbesar, yakni 17,70 persen apabila dibandingkan dengan angkatan kerja dan 18,19 persen dari penduduk yang bekerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 18 diantaranya merupakan pekerja setengah penganggur atau bekerja namun jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Kemudian Kabupaten Way Kanan yang memiliki pekerja setengah penganggur sebanyak 31.068 penduduk. Dengan demikian, persentase setengah penganggur terhadap penduduk yang bekerja adalah 14,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Way kanan, dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, terdapat 15 penduduk yang merupakan pekerja setengah penganggur dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Grafik 25. Perbandingan Persentase setengah menganggur Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017



Sementara itu, Kota Bandar Lampung merupakan Kota yang memiliki persentase pekerja setengah penganggur paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Lampung. Terdapat 17.585 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merupakan pekerja setengah penganggur di Kota Bandar. Terhadap total penduduk yang bekerja, terdapat 4,02 persen pekerja yang merupakan setengah penganggur.

KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

“Tingkat ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran mencapai 32,62 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, di Kabupaten Pesawaran, terdapat 101.874 penduduk yang merupakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian, tingkat ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran mencapai 32,62 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Pesawaran, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 33 orang.

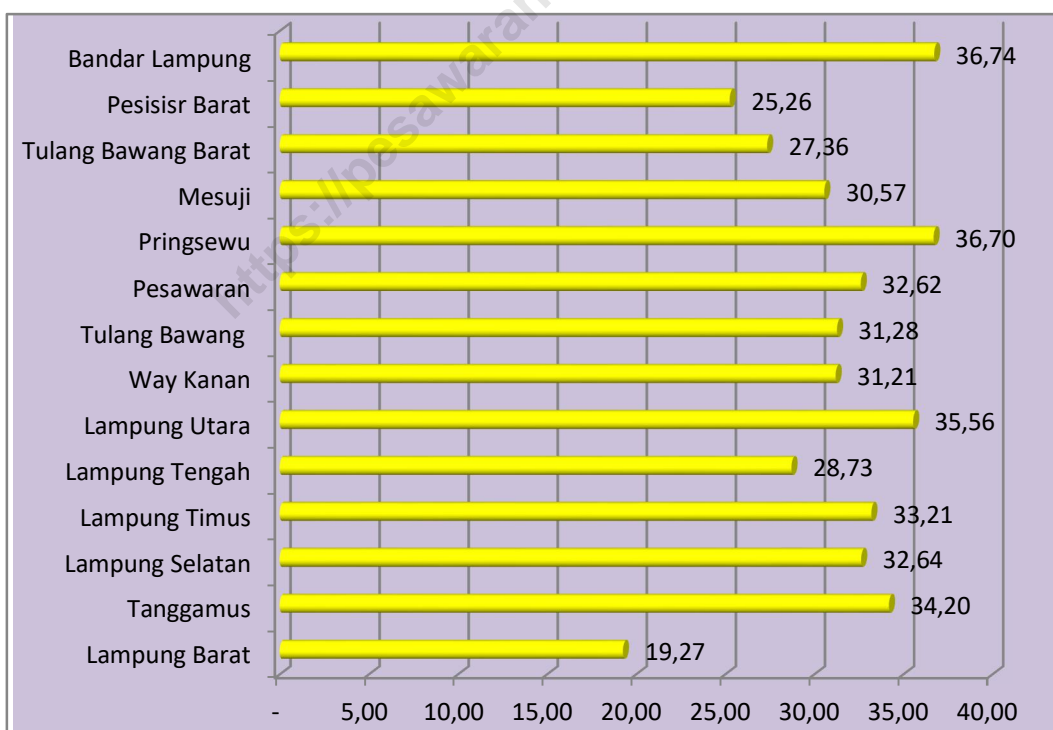
Berdasarkan jenis kelamin, bukan angkatan kerja paling banyak merupakan perempuan. Lebih dari lima puluh persen perempuan di Kabupaten Pesawaran merupakan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2017, jumlah perempuan di Kabupaten Pesawaran yang merupakan bukan angkatan kerja sebanyak 81.827 penduduk, sehingga tingkat ketidakaktifan perempuan sebesar 54,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas, terdapat 54 penduduk yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja). Sedangkan untuk laki-laki, terdapat 20.047 penduduk bukan angkatan kerja, sehingga tingkat ketidakaktifan laki-laki sebesar 12,45 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas, terdapat 12 penduduk yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja).

Tabel 7. Indikator Ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

Jenis Kelamin	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk 15+	Persentase Ketidakaktifan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	20.047	160.983	12,45
Perempuan	81.827	151.343	54,07
Pesawaran	101.874	312.326	32,62

“Persentase Ketidakaktifan Perempuan di Kabupaten Pesawaran mencapai 54,07 persen”

Grafik. 26 Perbandingan Tingkat Ketidakaktifan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017



“Kota Bandar Lampung merupakan Kota yang paling tinggi Tingkat Ketidakaktifannya”

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketidakaktifan tertinggi adalah Kota Bandar Lampung (36,74 persen), Kabupaten Pringsewu (36,70 persen), dan Kabupaten Lampung Utara (35,56 persen). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Tingkat ketidakaktifan terendah adalah Kabupaten Lampung Barat (19,27 persen), Kabupaten Pesisir Barat (25,26 persen), dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (27,36 persen).

<https://pesawarankab.bps.go.id>

BAB 4

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapain pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu Kabupaten untuk bersaing dengan sukses di pasar level provinsi maupun dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KLM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *internasional Standard Classification of education* (ISCED)

“Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD yaitu sebesar 24,95 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, Angkatan kerja pada Agustus 2017 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Bawah. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah dasar di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 sebesar 24,95 persen atau sebanyak 52.746 penduduk, kemudian untuk yang menyelesaikan sekolah menengah atas sebesar 24,16 persen atau sebanyak 51.078 penduduk, angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah pertama sebesar 23,88 persen atau sebanyak 50.474 penduduk sedangkan untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 3,86 persen atau sebanyak 8.155 penduduk. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih tingginya angkatan kerja yang tidak atau belum tamat Sekolah Dasar. Dimana, angkatan kerja yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 0,52 persen atau sebanyak 1.096 penduduk dan

angkatan kerja yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar sebesar 22,64 persen atau sebanyak 47.858 penduduk.

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2017, persentase angkatan kerja perempuan yang memiliki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi lebih besar dibandingkan laki-laki. Terdapat 6,81 persen perempuan dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III/Akademi/Universitas. Sedangkan untuk laki-laki hanya sebesar 2,40 persen. Artinya, angkatan kerja perempuan dengan pendidikan perguruan tinggi hampir 3 kali lipat dibandingkan laki-laki.

Namun, Untuk angkatan kerja dengan pendidikan tidak/belum tamat SD, Presentase perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dimana laki-laki sebesar 21,17 persen dan perempuan sebesar 25,61 persen. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan di atasnya, Laki laki mendominasi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, SMP dan SMA. Terdapat angkatan kerja laki-laki yang tingkat pendidikan SD sebesar 26,09 persen, SMP sebesar 25,29 persen dan SMA sebesar 24,48 persen. sedangkan pada perempuan, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD sebesar 22,65 persen, SMP sebesar 21,01 persen dan SMA sebesar 23,52 persen.

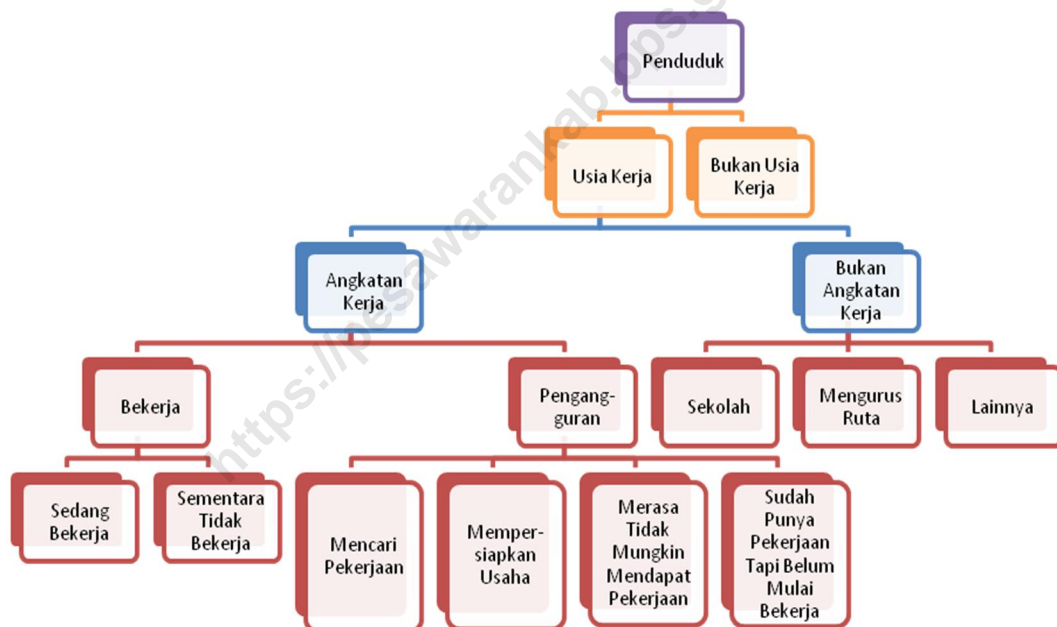
Tabel 8. Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah		Persentase		Kabupaten Pesawaran	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum pernah sekolah	808	288	0,57	0,41	1.096	0,52
Tidak/Belum Tamat SD	29.940	17.918	21,17	25,61	47.858	22,64
Sekolah Dasar	36.896	15.850	26,09	22,65	52.746	24,95
SMP	35.773	14.701	25,29	21,01	50.474	23,88
SMA	34.621	16.457	24,48	23,52	51.078	24,16
Perguruan Tinggi	3.393	4.762	2,40	6,81	8.155	3,86
Jumlah	141.431	69.976	100,00	100,00	211.407	100,00

Penjelasan Teknis

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)). Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumania dan lainnya.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk

Indonesia. Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, stand-by work dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi. Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan the one hour criterion, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, underemployment (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/underemployment), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM

- 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (KILM 6th ed) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja.

Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini dapat tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar;

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: A (*Agriculture*)/Sektor Pertanian, M (*Manufacture*)/Sektor Manufaktur dan S (*Services*)/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan.

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru

digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan

pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi dapat menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan dapat berupa distribusi dan dapat berupa rate.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 1) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK ($1-TPAK$).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita dapat berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat

pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

Di samping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15-□24 tahun), pemuda (16-□30 tahun) dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah) □ yang bukan merupakan bagian dari Sakernas □ yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi *L* (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital*

intensive). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor sehingga tidak dapat ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan.

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2017

Kabupaten/Kota	Tahun
	Agustus 2017
(1)	(2)
Lampung Barat	80,78
Tanggamus	65,91
Lampung Selatan	67,46
Lampung Timur	66,88
Lampung Tengah	71,35
Lampung Utara	64,52
Way Kanan	68,89
Tulang Bawang	68,82
Pesawaran	67,48
Pringsewu	63,4
Mesuji	69,51
Tulang Bawang Barat	72,71
Pesisir Barat	74,81
Bandar Lampung	63,41
Metro	62,31
Lampung	67,83

Lampiran 2 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota(Persen), Agustus 2017

Kabupaten/Kota	Tahun
	Agustus 2017
(1)	(2)
Lampung Barat	80,21
Tanggamus	62,76
Lampung Selatan	64,41
Lampung Timur	64,45
Lampung Tengah	69,33
Lampung Utara	61,03
Way Kanan	67,10
Tulang Bawang	66,65
Pesawaran	63,81
Pringsewu	60,62
Mesuji	69,24
Tulang Bawang Barat	71,54
Pesisir Barat	72,98
Bandar Lampung	58,53
Metro	59,63
Lampung	65,09

Lampiran 3 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota(Persen), Agustus 2017

Kabupaten/Kota	Tahun
	Agustus 2017
(1)	(2)
Lampung Barat	87,24
Tanggamus	83,80
Lampung Selatan	75,91
Lampung Timur	77,80
Lampung Tengah	72,27
Lampung Utara	69,14
Way Kanan	68,68
Tulang Bawang	69,12
Pesawaran	70,90
Pringsewu	70,53
Mesuji	67,70
Tulang Bawang Barat	79,16
Pesisir Barat	87,08
Bandar Lampung	37,68
Metro	53,13
Lampung	70,29

Lampiran 4 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Persen), Agustus 2017

Kabupaten/Kota	Tahun 2017		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	69,11	7,54	23,36
Tanggamus	61,17	8,13	30,70
Lampung Selatan	41,11	18,44	40,45
Lampung Timur	49,87	15,55	34,57
Lampung Tengah	52,09	16,74	31,18
Lampung Utara	53,89	10,43	35,68
Way Kanan	63,99	8,38	27,63
Tulang Bawang	60,40	11,68	27,92
Pesawaran	40,22	22,43	37,34
Pringsewu	27,47	26,65	45,88
Mesuji	62,37	7,43	30,20
Tulang Bawang Barat	64,35	9,02	26,63
Pesisir Barat	57,46	8,54	34,00
Bandar Lampung	3,15	18,43	78,41
Metro	10,68	21,44	67,88
Lampung	45,94	14,98	39,07

Lampiran 5 Indikator Penduduk Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2017

Kabupaten/Kota	Pekerja	Paruh Waktu	persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	172.763	28.045	27,68
Tanggamus	264.049	43.302	36,35
Lampung Selatan	454.422	59.003	20,82
Lampung Timur	484.169	60.405	25,88
Lampung Tengah	639.486	99.607	27,62
Lampung Utara	265.131	38.023	28,44
Way Kanan	211.912	28.589	28,88
Tulang Bawang	205.855	33.547	31,28
Pesawaran	199.288	29.238	25,67
Pringsewu	173.612	24.614	29,25
Mesuji	98.391	18.495	43,29
Tulang Bawang Barat	139.818	24.683	34,80
Pesisir Barat	76.909	13.104	28,35
Bandar Lampung	437.884	36.570	14,40
Metro	72.541	7.552	19,63
Lampung	3.896.230	544.777	26,53

Lampiran 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen),
Agustus 2017

Kabupaten/Kota	Tahun
	Agustus 2017
(1)	(2)
Lampung Barat	0,97
Tanggamus	5,35
Lampung Selatan	5,05
Lampung Timur	4,05
Lampung Tengah	3,18
Lampung Utara	5,96
Way Kanan	2,97
Tulang Bawang	3,59
Pesawaran	6,08
Pringsewu	4,86
Mesuji	0,65
Tulang Bawang Barat	1,89
Pesisir Barat	2,79
Bandar Lampung	8,81
Metro	4,86
Lampung	4,52



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 119, Kutoarjo, Gedung Tataan
Telp (0721) 94711, e-mail: bps1809@bps.go.id
<http://pesawarankab.bps.go.id>

